

Bab IV

INFILTRASI AGEN-AGEN GARIS KERAS TERHADAP ISLAM INDONESIA

Pengantar

FAKTOR TERPENTING KEUTUHAN BANGSA INDONESIA SEJAK DAHULU hingga sekarang adalah kesetiaan para elit dan anak-anak bangsa pada warisan tradisi dan budaya bangsa Indonesia sendiri, dan berbagai keragaman dan kesamaan menjadi fakta yang diterima dan dihargai. Pada hakikatnya, tradisi dan budaya bangsa Indonesia mengandung pesan-pesan luhur berbagai agama. Namun bukan berarti menghasilkan agama baru, melainkan menyerap pesan-pesan luhur yang terkandung dalam semua agama yang dianut bangsa Indonesia. Karena itu, kesamaan ini menjadi perekat keutuhan bangsa, sementara perbedaan yang ada menjadi kekayaan dan tidak dipertentangkan.

Para tokoh nasional sebelum kemerdekaan yang punya kepedulian kuat pada masalah-masalah kebangsaan terkait dengan agama, sudah sejak awal menyadari potensi ketegangan antara negara dan agama. Beberapa di antara mereka mulai mendiskusikan hubungan antara agama sebagai seperangkat ajaran dengan negara bangsa

atau nasionalisme.¹ Akhirnya diyakini, negara yang akan dibangun harus mampu menjamin keutuhan bangsa Indonesia serta melestarikan tradisi dan budaya bangsa. Dari sinilah lahir Pancasila yang dirumuskan dan digali Soekarno dari tradisi dan budaya bangsa Indonesia sendiri.

Secara historis maupun sosiologis dan kultural jelas bahwa Pancasila merupakan bagian integral dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Ini sebabnya, para tokoh dan pemimpin nasional memahami dengan tepat arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia, mereka juga merasakan bahwa di dalamnya terkandung pesan-pesan luhur semua agama. Tidak hanya itu, nilai-nilai luhur sebagaimana terkandung di dalam Pancasila tercermin dalam aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia yang moderat, toleran, *tepo-sliro*, dan lain-lain. Secara ringkas bisa dikatakan, praktik bangsa Indonesia adalah *living Pancasila*.

Memang, sekalipun hubungan antara Islam sebagai seperangkat ajaran dengan nasionalisme telah dibincang secara intensif jauh sebelum kemerdekaan, dalam sidang-sidang penetapan dasar negara—gagasan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara sempat muncul ke permukaan. Hal ini bisa dimengerti, karena pada dekade 1940-an dan 1950-an merupakan masa subur dan berkecamuknya berbagai macam ideologi di seluruh dunia. Namun akhirnya, dengan pemahaman dan pengamalan agama yang sangat mendalam dan spiritual, yang lebih menekankan isi daripada kemasan, para Pendiri Bangsa meyakini Pancasila sebagai merefleksikan esensi syariat dan secara bulat menyepakati sebagai dasar negara.²

1. Baca dalam “Pengantar Editor” buku ini.

2. Hal ini tidak menafikan fakta seperti disampaikan Bung Hatta tentang utusan Indonesia timur yang telah menemuinya dan menyampaikan untuk tetap bergabung menjadi Indonesia asal tidak ada formalisasi agama (baca: Islam). Sikap terbuka para ulama yang mengamini usulan atau syarat seperti disampaikan Bung Hatta ketika itu menunjukkan jiwa besar mereka. Mereka sadar betapa keluhuran dan kebesaran Islam, keagungan Allah swt., yang tak terbatas—tidak

Esensi syari'ah dimaksud adalah tercermin dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, yakni: pengakuan ketuhanan secara mono-teistik (sila pertama); penghargaan pada nilai-nilai kemanusiaan dalam kerangka keadilan dan peradaban (sila kedua); penolakan secara eksplisit terhadap separatisme dan mendahulukan kebersamaan atau jamaah (sila ketiga); kepemimpinan yang bijaksana (*hikmah*) dengan sistem musyawarah dan perwakilan (sila keempat); jaminan kesejahteraan rakyat, keadilan dan perlindungan hukum untuk siapa pun tanpa kecuali (sila kelima). Tak satu pun dari pesan-pesan luhur ini yang bertentangan dengan ajaran agama manapun yang dianut bangsa Indonesia. Inilah yang dimaksudkan bahwa Pancasila merefleksikan esensi syari'ah sebagaimana diyakini para Pendiri Bangsa.

Tidak bisa dipungkiri, kesadaran dan pemahaman yang mendalam atas tradisi dan budaya bangsa Indonesia pada satu sisi serta pemahaman dan pengamalan agama yang mendalam dan spiritual pada sisi yang lain, adalah faktor yang sangat menentukan keutuhan dan kelestarian Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemimpin Indonesia, terutama pemimpin formal pemangku kekuasaan politik, seharusnya orang yang mengerti dan setia pada tradisi dan budaya bangsa Indonesia pada satu sisi, serta mengerti secara mendalam dan mengamalkan agamanya secara spiritual pada sisi yang lain. Dalam hal ini, spiritualitas akan dengan kuat mendorong pada kesetiaan dan kejujuran menunaikan amanah kekuasaan.

Kekayaan dan keluarga, kekuasaan dan relasi personal, semua adalah cobaan yang akan terus menggoda seseorang untuk setia pada amanah (kepercayaan) yang harus ditunaikan atau justru menggunakan amanah yang diperoleh untuk meraih keuntungan pribadi dan kelompok. Di tengah arus dana asing (Wahabi) yang sangat besar dan menggoda, kejujuran personal menjadi sangat

akan pernah bisa dibatasi oleh formalitas kekuasaan politik yang sangat terbatas.

penting dan berharga. Di tengah arus ideologi transnasional yang sangat kuat, kesetiaan pada tradisi dan budaya bangsa menjadi amat penting dan berharga. Di sinilah semua komponen bangsa—khususnya para pemimpin bangsa— harus sadar untuk melestarikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia pada satu sisi, dan terus berusaha memahami agama yang dianut secara mendalam dan mengamalkannya secara tulus pada sisi yang lain. Para pemimpin harus benar-benar menjadikan “tahta untuk rakyat” sebagai kenyataan, bukan jargon politik yang bisa ditukar dengan komoditas lain demi meraih kekuasaan.

Prasyarat dalam bidang kultural dan agama ini sangat penting, terutama di tengah maraknya penyusupan ideologi transnasional yang berusaha keras meruntuhkan NKRI dan melenyapkan Pancasila. Kelompok-kelompok garis keras menyalahkan para Pendiri Bangsa karena telah memilih Pancasila sebagai dasar negara, bukan Islam. Menurut mereka, inilah penyebab krisis multidimensional di Indonesia: krisis ekonomi, degradasi moral, tidak tegaknya keadilan, tidak adanya kepastian hukum, maraknya korupsi, dan lain sebagainya. Dengan menimpakan semua masalah ini pada Pancasila, mereka ingin menodai Pancasila untuk kemudian melenyapkannya. Mereka menawarkan pemahaman sempit dan terbatas tentang Islam sebagai pengganti Pancasila. Dengan kata lain, mereka menginginkan formalisasi Islam. Usaha formalisasi agama yang ditolak oleh Sunan Kalijogo pada masanya. Padahal sebenarnya, jika mau jujur, nilai-nilai luhur Pancasila belum sepenuhnya diwujudkan. Bahkan, Pancasila sempat disalahgunakan sebagai senjata politik oleh beberapa penguasa yang lalu.

Sambil terus menimpakan semua masalah bangsa pada Pancasila, ada beberapa kelompok yang terus melakukan *sweeping* dan perusakan tempat hiburan dengan dalih *amr ma'rûf nahy munkar*, memfitnah murtad atau kafir, termasuk mengancam dan/atau menyerang siapa pun secara fisik semata karena tidak sejalan dengan mereka. Anehnya, semua ini tidak mereka rasakan sebagai

degradasi moral maupun pelanggaran hukum. Beberapa aksi janaan yang mereka lakukan tampak saling terkait dengan usaha-usaha konstitusional di parlemen, pemerintahan, dan fatwa MUI. Hal ini menjadi petunjuk bahwa mereka bekerja dengan sistem, bukan sebuah kebetulan, dalam usaha memperjuangkan ideologinya untuk mengatur semua aspek kehidupan bangsa Indonesia sesuai dengan pemahaman mereka yang sempit dan terbatas tentang Islam. Bahkan, ada indikasi kuat bahwa semua ini mendapat dukungan dana asing (Wahabi) yang luar biasa besar, dan masuk secara leluasa ke Indonesia.

Syeikh al-Akbar al-Azhar, Muhammad Sayyid Tantawi menilaili aksi-aksi yang bersifat intimidatif, merugikan pihak lain secara materi maupun non-materi, mengancam keselamatan atau bahkan menghilangkan jiwa dan/atau mencederai raga siapa pun, sekalipun dilakukan atas nama dakwah dan/atau *amr ma 'rûf nahy munkar*, itu adalah dakwah yang salah dan umat Islam harus menolaknya. Bahkan, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menangkap para pelaku kejahatan (*jarîmah*) tersebut dan menghukumnya mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Dakwah apa pun yang tidak sejalan dengan pesan luhur agama, adalah dakwah yang salah dan harus ditolak.³

Ideologi kelompok-kelompok garis keras yang totalitarian-sentralistik adalah untuk menguasai dan mengatur semua aspek kehi-

3. "Secara harfiah dakwah adalah mengajak... menawarkan tauhid, menawarkan agama Islam, menawarkan *akhlakul karimah*, akhlak mulia... Bukan mengancam, bukan menghujat... Keliru kalau dakwah itu serba menghakimi orang, mengka-firkan orang, menyesatkan orang... Dakwah yang baik itu adalah dakwah yang mencerahkan, yang mendidik, yang mencerdaskan, dan memberi harapan kepada manusia.....[S]emua dakwah yang berbeda dengan semua orientasi Ilahiyah ini, adalah dakwah yang salah." (Secara berurutan, penjelasan oleh KH. Masdar F. Mas'udi, Prof. KH. Said Aqil Siraj, Dr. Haedar Nashir, Prof. A. Syafi'i Ma'arif, dan Syeikh al-Akbar al-Azhar, Muhammad Sayyid Tantawi dalam: *Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil-'Ālamîn*, episode 5: "Dakwah," Supervisor Program: KH. A. Mustofa Bisri, ©LibForAll Foundation 2009).

dupan manusia. Sedangkan agenda mereka, menjadi wakil Tuhan (*khalifah Allah*) untuk mengatur semua aspek kehidupan manusia. Untuk mewujudkan ambisi ini, mereka menyusup dengan segala cara ke hampir semua bidang kehidupan bangsa Indonesia; di sektor swasta dan pemerintahan, dunia pendidikan maupun penerbitan, dunia politik maupun bisnis. Islam pribumi dan orientasi spiritual adalah dua hal yang selalu mereka serang, karena keduanya menjadi hambatan utama mereka mencapai tujuan.⁴

Menurut Dr. Haedar Nashir, Ketua PP. Muhammadiyah,

Pada umumnya gerakan ideologis masuk ke dalam lingkungan sosial tertentu bagaikan aliran air, dimulai dari tempat yang paling rendah dan terus mengalir untuk kemudian lama-kelamaan menjadi air bah, atau seperti orang makan bubur panas dari pinggir hingga ke tengah. Gerakan ideologis masuk dan mekar menempuh proses berikut ini: (1) Masuk ke lingkungan yang sepele atau mirip sehingga akan dengan mudah diterima tanpa kecurigaan dan kemudian berkembang cepat; (2) Mula-mula menyembunyikan paham dan tujuan utamanya namun lama-kelamaan merasuk menjadi ideologi yang diterima; (3) Dikembangkan oleh aktor-aktor atau pelaku-pelaku yang memiliki daya militansi dan kegigihan yang tinggi (*true believers*); (4) Memanfaatkan suasana rentan di tubuh organisasi atau lingkungan yang dimasuki sambil

4. “Jadi saya melihat ini semua garis keras segala macam itu kalau kita cari hulunya itu dari mental orang Arab, itu sangat jelas. Mengapa kita seperti dikejar-kejar. Ambil Islamnya dong, jangan diambil tafsiran-tafsiran. Arabisme tidak sama dengan Islam, termasuk berpakaian segala macam itu bagi saya, itu [bukan Islam]. Itu namanya kita mengadopsi suatu kultur atau subkultur secara sangat tidak cerdas. Al-Quran hanya mau bersahabat dengan orang yang beriman dan orang yang cerdas.” (Penjelasah Prof. A. Syafi’i Ma’arif dalam: *Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil-‘Ālamîn*, episode 3: “Umat,” Supervisor Program: KH. A. Mustofa Bisri, ©LibForAll Foundation 2009)

menunjukkan citra gerakannya sebagai lebih baik; (5) Menggunakan teori belah-bambu, yakni mendukung habis-habisan orang-orang yang bersimpati dan sebaliknya mengeliminasi atau mendelegitimasi orang-orang yang dianggap menjadi penghambat atau penentang ideologinya; (6) Menyuburkan benih-benih kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan pada ideologi-ideologi lain yang menjadi tandingannya untuk kemudian memasukkan virus ideologinya seolah-olah sebagai penawar; (7) Menyuburkan idiom-idiom yang positif (idealisis) tentang paham/ideologinya sambil mendelegitimasi ideologi/paham dan keberadaan pihak/lingkungan yang dimasukinya; (8) Tidak segan mengembangkan *taqiyah*, yakni menyembunyikan agenda dan ideologinya yang sekati/ sesungguhnya, sambil menampilkan hal-hal permukaan yang memikat atau menarik dari ideologinya; (9) Menampilkan diri sebagai “kekuatan alternatif” daripada yang lainnya dengan menggunakan filosofi air mengalir, yakni setelah ada celah atau lubang maka arus ideologi dan gerakannya masuk secara niscaya; (10) Tumbuh dan mekar karena di dalam organisasi/lingkungan yang dimasukinya ada pihak-pihak yang simpati, sepaham, dan mendukung; (11) Secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan pihak-pihak yang ada di dalam yang merasa tidak puas dengan keadaan, baik karena alasan personal maupun organisasional, jadi mengalir mengikuti orang-orang yang kecewa di dalam untuk dijadikan penyambung ideologi gerakannya, seperti memanfaatkan suasana konflik internal; (12) Menggunakan sebanyak mungkin sarana/media yang dapat menyebarkan benih-benih ideologinya, termasuk media yang ada di dalam organisasi atau lingkungan yang dimasukinya.⁵

5. Haedar Nashir, *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah*

Walaupun Dr. Haedar menulis bukunya: *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?* Untuk menyelamatkan ormas KH. Ahmad Dahlan dari infiltrasi PKS dan gerakan-gerakan garis keras lain, tulisannya juga sangat tepat sebagai penjelasan cara penyusupan gerakan Islam transnasional ke seluruh bidang kehidupan bangsa kita.

Menghadapi bahaya laten ini, pemimpin Indonesia haruslah orang yang mengerti tradisi dan budaya bangsa, yang mendalam pemahamannya tentang agama dan taat mengamalkannya secara spiritual. Hal yang pertama akan mendorong kesetiaan sejati pada tradisi dan budaya bangsa, sedangkan spiritualitas akan mendorong kesetiaan kepada rakyat dan perjuangkan mewujudkan pesan-pesan luhur Pancasila. Kedekatan dengan Tuhan akan membuat seorang pemimpin mampu memahami hati nurani rakyatnya, karena dengan kedekatan tersebut dia akan selalu berada dalam bimbingan Tuhan dalam menunaikan amanah *khilāfah*, dia akan diatur oleh-Nya: apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak, karena —dengan kedekatan yang sesungguhnya— Dia akan menjadi pendengaran, penglihatan, lisan, dan kedua kaki-Nya⁶ dalam menunaikan amanah yang diembannya.

Halaman-halaman berikut melaporkan temuan penelitian tentang penyusupan para agen garis keras terhadap Islam Indonesia, termasuk Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga-lembaga Pendidikan, instansi pemerintahan dan swasta, serta penyusupan dana asing yang digunakan membiayai proyek penyusupan dalam semua bidang ini. Paduan sistem, ideologi, dan dana yang kuat telah membuat penyusupan ini semakin luas, mendalam, dan berbahaya bagi bangsa Indonesia.

yah? (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 57-59.

6. Selengkapnya, hadits qudsī ini berbunyi: *Lā yazāl al-'abd yataqarrabu ilayya bi al-nawāfil hatta uhibbahu. Fa-idza ahabtuhu, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, kuntu 'aināhu allati yubshiru biha, kuntu lisanahu alladzi yanthiqu bihi, kuntu rijlāhu allati yabthisyu biha.*

Infiltrasi di Muhammadiyah

Pada bulan Desember 2006 ormas Muhammadiyah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat (SKPP) Muhammadiyah Nomor: 149/Kep/I.O/B/2006 tentang “Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah.” Surat Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA dan Sekretaris Umum Drs. H.A. Rosyad Sholeh.

SKPP ini dikeluarkan dengan tujuan untuk “menyelamatkan Muhammadiyah dari berbagai tindakan yang merugikan Persyarikatan”. Apa tindakan yang merugikan itu? Ada sepuluh butir keputusan yang dituangkan dalam SKPP tersebut. Secara garis besar tindakan yang disebut merugikan itu antara lain adalah infiltrasi di tubuh Muhammadiyah dari organisasi lain yang memiliki paham, misi, dan kepentingan yang berbeda dengan Muhammadiyah.

SKPP menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik yang telah memanfaatkan Muhammadiyah untuk tujuan meraih kekuasaan politik. Karena itu SKPP menyerukan kepada para anggota dan pimpinan Muhammadiyah agar membebaskan diri dari misi dan tujuan partai politik tersebut. “Muhammadiyah harus bebas dari pengaruh, misi, infiltrasi, dan kepentingan partai politik yang selama ini mengusung misi dakwah atau partai politik bersayap dakwah, di samping bebas dari misi/kepentingan partai politik dan organisasi lainnya sebagaimana kebijakan khittah Muhammadiyah.”

Sejauhmana sebenarnya “cengkraman” PKS dan gerakan garis keras lain dalam Muhammadiyah dan bagaimana itu bisa terjadi sehingga ormas terbesar kedua di Indonesia ini merasa khawatir? Di sini akan digarisbawahi poin-poin yang disebut SKPP sebagai penyusupan partai politik bersayap dakwah yang memanfaatkan amal usaha, masjid, lembaga pendidikan, dan fasilitas lainnya milik Muhammadiyah untuk kegiatan politik. Aktivitas PKS di tubuh

Muhammadiyah yang mengatasnamakan dakwah seperti pengajian dan pembinaan keumatan, juga disebut dalam SKPP ini sebagai telah digunakan untuk kepentingan politik.

Bukan hanya itu, organ-organ media massa yang berada di lingkungan Muhammadiyah rupanya juga telah disusupi gerakan garis keras, baik oleh orang-orang yang berasal dari luar maupun yang sejak semula merupakan anggota Muhammadiyah lalu menjadi aktivis kelompok garis keras sambil tetap menancapkan kakinya di Muhammadiyah. SKPP menyerukan agar seluruh media massa yang berada di lingkungan Muhammadiyah benar-benar menyuarakan paham, misi, dan kepentingan Muhammadiyah serta menjadi wahana untuk sosialisasi paham, pandangan, keputusan, kebijakan, kegiatan, dan syiar Muhammadiyah serta menjauhkan diri dari paham, misi, dan kepentingan organisasi/gerakan lain.

SKPP Muhammadiyah ini memang lahir untuk memperkuat upaya konsolidasi di tubuh organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya infiltrasi ideologi dan gerakan lain di tubuh Muhammadiyah telah dianggap sebagai persoalan yang serius. Salah satu buktinya adalah munculnya sikap mendua di kalangan Muhammadiyah seperti dalam melaksanakan Hari Raya Idul Fitri/Idul Adha, serta menjadikan Muhammadiyah sebagai sarana kegiatan partai politik (baca: PKS), yang menimbulkan pengeroposan dan mengganggu keutuhan organisasi.

Tiga bulan sebelum SKPP ini lahir, telah terbit sebuah buku yang ditulis oleh Ketua PP Muhammadiyah, Dr. H. Haedar Nashir, yang berjudul: *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?*⁷ Buku ini mengupas secara jelas upaya-upaya penyulu-

7. Dalam waktu lima bulan sejak diterbitkan pertamakali pada Agustus 2006, buku *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?* Karya Haedar Nashir ini telah dicetak ulang lima kali oleh Suara Muhammadiyah dengan jumlah tiras 25.000 eksemplar. Kutipan-kutipan di sini diambil dari cetakan ke-5, Januari 2007, ditambah hasil wawancara dengan Haedar Nashir tanggal 20 Februari 2008.

supan yang dilakukan Gerakan Tarbiyah (PKS) ke dalam tubuh Muhammadiyah.

Buku inilah yang menjadi alasan bagi keluarnya SKPP Muhammadiyah yang telah disebutkan di atas karena, “Adanya keresahan di sejumlah daerah mengenai kehadiran pengembangan paham dan gerakan Islam lain seperti paham Tarbiyah dan ideologi PKS di sementara lingkungan Muhammadiyah, baik di Persyarikatan maupun amal usahanya, yang bersifat faktual atau nyata dan tidak mengada-ada, yang menuntut ketegasan sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah.”⁸

Mengapa gerakan PKS meresahkan Muhammadiyah? Menurut Haedar, karena ia masuk ke dalam tubuh Muhammadiyah dan menarik anggota atau menyebarkan paham gerakannya. Haedar mengakui bahwa pada mulanya tidak ada masalah antara Muhammadiyah dengan PKS. Bahkan mempersilakan PKS jika ingin memperoleh dukungan dari anggota Muhammadiyah asalkan, “harus menampilkan sikap yang simpatik dan menjaga hubungan yang harmonis, bukan melakukan ekspansi dengan alasan sebagai gerakan dakwah (sayap dakwah) yang berhak masuk ke mana pun.”⁹ Masalah etika ini menjadi titik persinggungan yang pertama antara Muhammadiyah dengan PKS. Dan ini bukan satu-satunya.

Perbedaan paham dan misi antara Muhammadiyah dengan PKS merupakan titik persinggungan yang paling penting ketika keduanya berhimpitan. Muhammadiyah memiliki paham dan misi perjuangan yang sangat jelas sebagai organisasi moderat. Sementara itu PKS mengembangkan “konsep Tarbiyah yang melekat dan tidak lepas dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang memiliki keyakinan, sistem, metode, strategi, dan teknik tersendiri dalam gerakannya di Mesir. Bahkan di ujung kepemimpinan Hasan al-Banna, kemudian di bawah Sayyid Qutb, gerakan Ikhwanul Muslimin tampil menjadi kekuatan politik yang radikal dan terlibat dalam konflik-konflik

8. *Ibid.*, h. 41.

9. *Ibid.*, h. 44-45.

politik yang keras, termasuk pembunuhan Perdana Menteri Mesir, Mahmoud an-Nukrashi Pasha pada Desember 1948, yang kemudian berujung dengan terbunuhnya dua tokoh Ikhwanul Muslimin tersebut. Konsep pembinaan anggotanya melalui gerakan Tarbiyah tampak monolitik dan melahirkan militansi yang tinggi dan radikal dalam gerakan Ikhwanul Muslimin.”¹⁰

Menurut Haedar, “[P]erkembangan gerakan Tarbiyah di Indonesia cukup pesat, sehingga dalam tempo sepuluh tahun sejak tahun 1980, telah menyebar ke seluruh kampus-kampus ternama di Indonesia seperti UI, IPB, ITB, UGM, Unair, Brawijaya, Unhas, dan lain-lain. Lebih-lebih setelah kelahiran dua majalah Tarbiyah yang terbit akhir tahun 1986, yakni *Ummi* dan *Sabili*, yang menyebarkan pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin.”¹¹ Dua media masa dengan tiras yang cukup besar itu (majalah *Sabili* diperkirakan terbit 100.000 eksemplar setiap edisi),¹² selain menjadi wahana pembinaan juga sebagai media informasi dan komunikasi pemikiran Tarbiyah di Indonesia.

Haedar mengutip pernyataan Anis Matta, tokoh dan Sekjen PKS bahwa inspirasi-inspirasi Ikhwanul Muslimin memberi kekuatan pada PKS. Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, berhasil mengubah pembaharuan dari wacana menjadi gerakan. Dan tidak berlebihan, ujar Anis, “bila inspirasi gerak itu juga yang secara terasa dapat diselami dalam denyut Partai Keadilan Sejahtera.”¹³ Yang secara jelas bertabrakan dengan paham dan misi Muhammadiyah tentu saja konsep Tarbiyah itu sendiri (yang menjadi sistem Ikhwanul Muslimin), terutama yang berorientasi pada pendirian **Negara Islam, dengan sistem dan undang-undang yang harus ditegakkan**

10. *Ibid.*, h. 15.

11. *Ibid.*, h. 25.

12. Lihat, Arskal Salim dan Azyumardi Azra, “The State and Shari’a in the Perspective of Indonesian Legal Politics,” *Introduction* dalam buku *Shari’a and Politics in Modern Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2003).

13. Haedar, *op. cit.*, h. 33-34.

di dalamnya.¹⁴ Masuk akal kalau Muhammadiyah menganggap hal ini sebagai ancaman bukan saja bagi Muhammadiyah tapi juga bagi bangsa. Muhammadiyah jelas tidak bercita-cita mendirikan negara Islam, dan telah menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Dalam kesaksian tokoh-tokoh Muhammadiyah, infiltrasi PKS ke dalam Muhammadiyah sebenarnya sudah terlihat sejak menjelang pemilu 2004, dan semakin jelas pada Mukhtamar Muhammadiyah di Malang tahun 2005. Seorang tokoh Muhammadiyah, sebagaimana dikutip Syirah,¹⁵ mengemukakan bahwa infiltrasi PKS ke dalam Muhammadiyah dilakukan lewat anggotanya sendiri. Upaya yang sistematis itu semakin terlihat tepatnya di dalam sidang komisi. “Orang-orang tertentu sengaja dikirim masuk ke dalam komisi-komisi tersebut,” kata sumber tadi. Kemudian sumber tadi memasuki semua komisi untuk mencari kejelasan tanda-tanda tersebut. Dan dugaannya memang benar, nuansa di dalam forum komisi hampir sama semua. Wacana yang dikembangkan pun sama yaitu menilai Muhammadiyah sudah keluar dari syari’ah Islam dan Tarjih pun sudah keluar dari khittah.

Sumber tadi juga menuturkan bahwa seseorang Muhammadiyah, Buya Syafi’i (Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif), mendapat SMS dari orang Muhammadiyah sendiri, yang isinya seruan agar tidak memilih orang-orang tertentu karena orang-orang itu perlu di-Islamkan. “Penyusupan wacana dan ideologi itu dilakukan oleh anggota Muhammadiyah sendiri yang merangkap di PKS. Meski jumlah mereka tidak begitu besar di dalam forum Mukhtamar, namun gerakan yang begitu sistematis itu membuat mereka mampu mewarnai dan mendominasi forum,” ungkapnya.¹⁶ Apalagi PKS tidak bergerak sendirian, melainkan bersama-sama dengan para aktivis

14. *Ibid.*, h. 9. Cetak tebal (*bold*) mengikuti aslinya.

15. “Intervensi PKS Ke Muhammadiyah Dilakukan Secara Sistematis.” http://www.syirah.com/syirah_ol/online_detail.php?id_kategori_isi=1734

16. *Ibid.*

HTI yang sengaja disebar di arena Muktamar sebagai peserta atas nama utusan daerah-daerah. Kampanye PKS dan HTI terang-terangan dilakukan di arena Muktamar dengan menyebarkan daftar nama-nama yang harus dipilih dan tidak perlu dipilih ke sebagian besar peserta Muktamar dari Jawa, Jabotabek, Sulawesi, Sumatera dan Indonesia Timur (NTT, NTB, Ambon).

Dalam arena Muktamar juga terjadi perdebatan keras antara kaum muda Muhammadiyah yang berhaluan moderat-progresif versus HTI. Muhammad al-Khattat atau Gatot (ketika menjadi Ketua HTI)¹⁷ yang menjadi peserta Muktamar dari Jakarta mencoba “menghabisi” kaum muda Muhammadiyah yang tergabung dalam Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), ketika Panitia Muktamar menggelar diskusi dengan tema, “JIMM: Berkah atau Laknat?”

Tatkala nama-nama calon ketua Muhammadiyah perempuan diusung dalam arena muktamar, para aktivis HTI menanggapi dengan gemuruh sambil berteriak bahwa jajaran peminan Muhammadiyah tidak layak untuk perempuan, sebab perempuan bukanlah pemimpin; mereka menganggap hal itu tidak Islami. Dan setiap kali perempuan bicara di arena Muktamar maka cemoohan pun berkumandang dari sebagian peserta Muktamar laki-laki aktivis HTI.

Ketika forum Muktamar membahas isu adanya infiltrasi dari organisasi lain atas nama dakwah, sebagian peminan Muhammadiyah yang merangkap anggota di PKS dan HTI tidak senang. Mereka berdalih bahwa “PKS dan HTI itu sama-sama Islam dan membantu Muhammadiyah, maka tidak logis kalau kita harus melarang kedua organisasi itu bergerak lewat Muhammadiyah.” Namun

17. Muhammad al-Khaththat sudah dipecat dari posisinya sebagai Ketua HTI karena melakukan kegiatan yang dilarang oleh Pengrus HT Pusat (Internasional), yakni bergabung dengan organisasi Islam lain dengan mengatasnamakan HTI. Baca dalam <http://osolihin.wordpress.com/2008/10/20/m-al-khaththat-dikeluarkan-dari-hti-kenapa-ditutup-tutupi/>

klaim membantu Muhammadiyah itu dibantah oleh Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. Menurutnya, kalau benar mau membantu seharusnya mereka melepaskan bajunya (baca: baju PKS dan HTI).¹⁸

Sejatinya, infiltrasi terhadap Muhammadiyah sudah berlangsung sejak minimal dua tahun sebelum Muktamar Malang. Itu yang menjadi alasan mengapa beberapa kebijakan PP Muhammadiyah berhasil dibatalkan oleh kelompok garis keras karena dipandang tidak sesuai dengan ideologi mereka. Kebijakan yang dibatalkan itu antara lain Dakwah Kultural (panduan bagi aktivis Muhammadiyah untuk bersikap moderat), kepemimpinan perempuan, dan pengembangan pemikiran Islam di Lembaga Tarjih. Terhadap beberapa tokoh moderat Muhammadiyah yang dianggap berpengaruh atas keluarnya kebijakan PP Muhammadiyah tersebut disebarluaskan isu bahwa mereka adalah pengikut paham sekuler dan liberal, bahkan dengan kosa kata yang kasar seperti "sipilis" (penyakit kelamin)—sebagai akronim dari sekuleris, pluralis dan liberalis. Istilah "sipilis" ini dipopulerkan Adian Husaini, seorang aktivis DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) yang sangat gemar menggunakan kata-kata kotor (seperti *sipilis* tadi) dalam tulisan-tulisannya ketika menyerang orang lain yang berbeda paham dan pemikiran.

Tentang mudahnya ormas seperti Muhammadiyah diinfiltrasi kelompok Tarbiyah Ikhwanul Muslimin atau PKS, menurut Haedar, karena Muhammadiyah sebagai organisasi cenderung longgar dan tidak monolitik. Namun yang lebih penting lagi, para kader PKS cenderung melakukan pragmatisasi peribadatan, yakni dapat menjalankan praktek peribadatan di dua wilayah sekaligus untuk mengesankan sebagai kelompok alternatif. "Jika berada di Muhammadiyah mereka akan seperti warga Muhammadiyah, dan jika berada di tengah warga NU, maka mereka akan beribadah seperti warga NU. Ini adalah bentuk lain dari *taqiyyah* (menyembunyikan

18. Wawancara dengan Haedar Nashir di Kantor PP. Muhammadiyah di Jakarta, 20 Februari 2008.

identitas diri—red),” kata Haedar Nashir,¹⁹ atau sebenarnya *nifaq*.

Buntut dari adanya infiltrasi itu keluarlah SKPP Muhammadiyah tadi. SKPP ini membuat kelompok-kelompok garis keras berang. HTI menuntut agar SKPP ini juga diberlakukan terhadap kelompok-kelompok progresif-moderat di Muhammadiyah. Padahal kelompok-kelompok progresif-moderat sejatinya sudah tersingkir dari jajaran kepengurusan Muhammadiyah akibat manuver kelompok-kelompok garis keras. Dan yang paling terpuak dengan keluarnya SKPP ini tentu saja PKS karena namanya disebut secara eksplisit, sehingga PKS pun perlu mengeluarkan respon melalui sebuah “Risalah” yang intinya membantah bahwa PKS telah berusaha menguasai masjid, jadwal khotib, rumah sakit, sekolah dan kampus, atau amal usaha milik organisasi lain.²⁰

Tiga belas bulan setelah keluarnya SKPP Muhammadiyah, PKS mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 1-4 Februari 2008 di Bali. Mukernas ini dapat dibaca sebagai reaksi terhadap lahirnya SKPP Muhammadiyah dan buku Haedar Nashir. Ini terlihat dari rekomendasi yang dihasilkannya, antara lain menyangkut pluralitas dan semangat kebangsaan. “Bagi PKS, Pancasila dan UUD 1945 sudah final sebagai dasar negara dan konsitusi nasional bangsa.”²¹ Di Mukernas Bali itu juga PKS menyatakan diri sebagai partai terbuka dan menerima calon legislatif dari kalangan non-Muslim. Dipilihnya Bali (pulau Dewata Hindu) sebagai tempat Mukernas juga bermakna simbolik bahwa PKS kini telah berubah. Apalagi para petinggi partai di acara tersebut terlihat mengenakan *udeng-udeng*, penutup kepala yang menjadi tradisi umat Hindu Bali.

Mengapa setelah 10 tahun berdiri PKS baru sekarang bicara

19. Wawancara, *ibid*.

20. “Risalah PKS untuk Mengokohkan Ukhuwah dan Ishlah,” dikeluarkan tanggal 27 September 2007.

21. Pernyataan Mahfudz Siddiq, Ketua Fraksi PKS di DPR dan Ketua Tim Operasi Media Mukernas Bali. Lihat, “Mukernas PKS Rekomendasikan Tiga Agenda,” *Republika*, 4 Februari 2008, h. 3. Lihat juga, “PKS Serukan Bangkitkan Semangat Kebangsaan,” *Kompas*, 4 Februari 2008, h. 3.

tentang pluralitas, perlunya semangat kebangsaan, dan menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai telah final? Jawaban sederhananya tentu karena kalkulasi politik menjelang Pemilu 2009. PKS jelas tidak berdaya di hadapan konstituen pemilih Islam yang sebagian besar berafiliasi kepada Muhammadiyah dan NU yang memang bervisi kebangsaan, pluralis, dan menerima Pancasila dan UUD 1945 telah final sebagai dasar dan konstitusi negara Indonesia. Oleh karena itu, PKS tidak bisa memandang sebelah mata SKPP Muhammadiyah tersebut.

Namun jalan yang ditempuh PKS untuk menjadi partai terbuka dan menerima Pancasila sebagai dasar negara bukan hal yang mudah. Beberapa hari setelah Mukernas, partai ini harus menjelaskan kepada konstituennya yang keberatan dengan berbagai kebijakan yang dihasilkan dalam Mukernas Bali. Menghadapi berbagai reaksi itu, pada 6 Februari 2008, PKS mengeluarkan “Bayan Seputar Isu Partai Terbuka dan Caleg Non Muslim” yang dikirim ke berbagai media massa.

Isi *bayan* (penjelasan) itu adalah bahwa sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syuro PKS ke VII di Jakarta, dan dikuatkan kembali dalam Musyawarah Majelis Syuro PKS IX di Bali adalah: Bersih, Peduli dan Profesional. Dalam *bayan* itu, PKS juga menyinggung tentang adanya isu yang menyebutkan bahwa PKS menjadi partai terbuka. Dalam hal ini, *bayan* tersebut menyatakan, istilah “terbuka” tidak pernah menjadi keputusan partai, baik oleh sidang-sidang Majelis Syuro, Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) maupun dalam Khitob Qiyadi (arahan pimpinan). Selanjutnya disebutkan bahwa PKS tetap sebagai partai dakwah yang berasaskan Islam, memiliki moral Islam, dan syariat Islam wajib dengan konsisten dijalankan oleh setiap pemeluk agama Islam, terutama kader-kader PKS. Selanjutnya PKS meminta seluruh jajaran struktur, pengurus dan kader supaya tidak lagi mewacanakan isu “partai terbuka” untuk menghindari mudharat yang lebih besar daripada kemaslahatan yang diharapkan.

Isu PKS sebagai partai terbuka memperoleh tantangan keras dari kalangan dalam PKS sendiri, akhirnya PKS kembali menjadi partai tertutup, hanya untuk kalangan Islam dan konsisten memperjuangkan syariat Islam. Mengapa PKS begitu mudah memungkiri kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya di Mukernas Bali? Tampaknya PKS ingin menempuh politik bermuka dua: untuk konsumsi publik yang lebih luas ia perlu menegaskan identitas sebagai partai terbuka dan bervisi kebangsaan dengan retorika menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai telah final bagi bangsa Indonesia. Namun di hadapan konstituennya ia tetap menyatakan diri sebagai partai dakwah berasas Islam, dan syariat Islam wajib dengan konsisten dijalankan oleh setiap pemeluk agama Islam (Pia-gam Jakarta). Jika begitu, bukankah berarti bahwa retorika penerimaan Pancasila dan UUD 1945 hanya sebagai tameng?

Menjadi jelas bahwa PKS sangat terganggu dengan SKPP Muhammadiyah. Karena itu berbagai cara ditempuh agar SKPP itu tidak relevan bagi PKS. Salah satu caranya adalah memasang tameng penghalang. Ibarat bermain catur, ketika sang raja di-*skak* maka cara yang aman adalah menghalanginya dengan buah catur yang lain. Dalam hal ini, Pancasila dan UUD 1945 digunakan sebagai buah catur (tameng penghalang dari serangan musuh). Persis di sinilah letak bahayanya. Infiltrasi di Muhammadiyah yang berakibat keluarnya SKPP justru dimanfaatkan oleh PKS untuk menyusup lebih jauh ke jantung kesadaran bangsa Indonesia, yaitu dengan mengklaim telah menerima Pancasila dan UUD 1945. Dengan begitu, bukan saja SKPP Muhammadiyah “menjadi tidak relevan,” tapi juga kecurigaan bahwa PKS pada akhirnya mencita-citakan pendirian negara Islam “menjadi tidak berdasar.” Sayangnya, orang Melayu terlanjur yakin pada pepatah bahwa: “Ular yang paling berbahaya adalah ular yang bisa berubah warna!”

Hingga awal tahun 2009 ini, SKPP Muhammadiyah masih belum bisa diimplementasikan secara efektif. Hal ini menjadi bukti betapa kuat dan dalam infiltrasi garis keras masuk ke dalam

Muhammadiyah. Mereka terus melancarkan perang ideologi dan melakukan *black-campaign* terhadap siapa pun yang tidak setuju atau menjadi hambatan di dalam tubuh Muhammadiyah. Tokoh-tokoh moderat Muhammadiyah prihatin pada perkembangan bahwa kelompok-kelompok garis keras semakin kuat di Muhammadiyah sehingga mungkin saja mereka akan berhasil merebut Muhammadiyah pada Muktamar 2010. Jika ini terjadi, bangsa Indonesia tidak hanya kehilangan salah satu aset kultural ormas moderatnya dan mungkin Muhammadiyah akan menjadi salah satu bunker baru gerakan garis keras di Indonesia, bangsa Indonesia juga akan kehilangan salah satu soko guru Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

Penyusupan di Nahdlatul Ulama

Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) pantas merasa terusik dengan berbagai perkembangan yang dianggap membahayakan bangsa dan organisasinya, terutama menyangkut paham *Ahlussunah wal Jamaah* yang dianut warga NU. Ditengarai bahwa gerakan-gerakan garis keras telah menyusup ke dalam NU melalui masjid-masjid, majlis-majlis taklim, dan pondok-pondok pesantren yang menjadi basis warga Nahdliyin (sebutan untuk warga NU).

Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi menyebut bahwa masjid-masjid yang selama ini dibangun dan dikelola oleh warga NU berikut takmir masjid dan tradisi ritual peribadatannya telah diambil alih oleh kelompok Islam ekstrim. Menurutnya, hal itu dilakukan karena kelompok yang kerap membid'ahkan bahkan mengkafirkan warga Nahdliyin itu “[T]idak mampu membuat masjid sendiri, kemudian mengambil alih masjid orang lain (masjid warga nahdliyin, red), terus dipidato di situ untuk politisasi. *Kan* maksudnya begitu. Yang dirugikan akhirnya NU,” ungkap Hasyim Muzadi yang menyebut kelompok ekstrem itu antara lain adalah pengusung wacana Khilafah Islamiyah, yakni Hizbut Tahrir

Indonesia.²²

Hasyim menginstruksikan semua pengurus NU di seluruh Indonesia untuk menjaga masjid agar tidak dimasuki oleh kelompok-kelompok garis keras. Ia juga mengingatkan agar kelompok-kelompok garis keras itu diwaspadai karena secara keyakinan memang sudah tidak segaris dengan NU. “Mereka adalah kelompok yang ingin mendirikan negara Islam,” tegasnya.²³

Isu penyusupan kelompok-kelompok garis keras ke dalam NU sebenarnya telah lama menjadi pembicaraan yang santer di kalangan warga Nahdliyin. Salah satu alasan keompok-kelompok garis keras sering menuduh masjid-masjid NU mengajarkan bid’ah dan beraliran sesat, adalah untuk merebut masjid-masjid tersebut. Karuan saja tuduhan itu membuat para tokoh NU berang. Pada 25 Februari 2007 Pimpinan Pusat (PP) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) mengeluarkan maklumat yang berisi peneguhan kembali ajaran dan amaliyah *Ahlussunnah wal Jamâ’ah* (Aswaja) yang selama ini dipraktikkan oleh warga Nahdliyin. Sebanyak 8 Ketua Pengurus Wilayah LDNU se-Indonesia menandatangani maklumat yang merupakan respon atas tuduhan sesat terhadap ajaran dan amaliyah NU itu.

Maklumat itu berbunyi sebagai berikut: “...kami menyadari dengan sepenuh hati, bahwa dewasa ini telah tumbuh dan berkembang gejala pemikiran dan gerakan ke-Islam-an (*al-harakah al-islamiyyah*) melalui praktik-praktik keagamaan yang dapat melunturkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah ala NU, maka dengan ini kami menyatakan: ‘...Senantiasa menjalankan amaliyah ibadah Ahlussunnah wal Jama’ah a la NU; melestarikan prak-

22. Hasyim Muzadi: “Khilafah Islamiyah bukan Gerakan Agama, tapi Gerakan Politik.” Lihat, *NU Online*, Selasa, 5 September 2006.

23. “Hasyim Imbau Takmir Masjid NU Waspada,” lihat *NU Online*, Selasa, 28 November 2006.

tik-praktik dan tradisi keagamaan salafush shalih; seperti salat-salat sunnah, salat tarawih 20 rakaat, wirid, salawat, qunut, talqin, ziarah qubur, tahlil, manaqib, ratib, Maulid Nabi, haul, dan istighotsah; serta toleran terhadap tradisi budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari dakwah Ahlussunnah wal Jamaah *a la NU*.”²⁴

Maklumat itu merupakan rangkaian respon NU terhadap gerakan kelompok-kelompok garis keras yang telah menjadikan NU sebagai sasaran penyusupan paham mereka yang radikal dan bertentangan dengan paham Aswaja NU yang moderat. Menurut Ketua Umum PP- LDNU, KH. Nuril Huda, “NU merasa perlu segera melakukan gerakan-gerakan nyata untuk menyelamatkan paham yang sudah diyakini kebenarannya selama ini. Jika tidak, tidak ada jaminan dalam waktu sepuluh tahun mendatang ajaran moderat yang terkandung dalam Aswaja akan hilang dan tergantikan oleh paham yang lain.”²⁵

Menurut salah seorang Ketua PBNU, KH. Masdar F. Mas’udi, “Jumlah masjid milik warga NU yang disusupi dan diambil alih oleh kelompok-kelompok garis keras yang mengklaim dirinya paling benar itu mencapai ratusan. Mereka menganggap masjid-masjid NU mempraktikkan bid’ah dan beraliran sesat. Proses pengambilalihan masjid-masjid itu berbentuk penggantian para takmir masjid yang selama ini diisi oleh warga Nahdliyyin. Tradisi-tradisi ritual keagamaan khas NU pun diganti,” katanya.²⁶ Tidak hanya menyusup ke masjid-masjid NU, kelompok-kelompok garis keras

24. “NU Layani Tantangan Kelompok Islam Garis Keras,” lihat *NU Online*, Selasa, 27 Februari 2007.

25. “Rebut Kembali Masjid Nahdliyyin, LDNU Kumpulkan Majelis Ta’lim se-Jabotabek,” lihat, *NU Online* 24 Agustus 2006.

26. “Dianggap Sesat, Masjid-masjid NU Diambilalih,” lihat. *NU Online*, Kamis, 25 Mei 2006.

juga telah menyusup ke organisasi generasi muda NU, pondok-pondok pesantren NU, dan organisasi-organisasi majelis taklim di bawah naungan NU.

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) adalah salah satu organisasi di bawah NU yang menjadi sasaran penyusupan kelompok-kelompok garis keras. Ketua Pimpinan Pusat (PP) IPNU, Muhammad Asyhadi menyebutkan, “Saat ini kaum muda NU yang telanjur masuk ke dalam gerakan Islam garis keras cukup banyak. Kalau sudah masuk, mereka biasanya kehilangan identitas ke-NU-an dan ke-IPNU-annya. Untuk itu, IPNU telah bekerjasama dengan ikatan pelajar lainnya dalam menghadang pengaruh aliran garis keras di lingkungan masing-masing melalui pelatihan motivasi pelajar dengan sasaran pelajar.”²⁷

Kelompok-kelompok garis keras juga menyusup ke pondok-pondok pesantren. Tak pelak, para pemimpin pesantren pun merasa gerah dengan gerakan ini. Maka pada tanggal 18-21 Mei 2007, Rabithath al-Ma’ahid al-Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) mengumpulkan para Pimpinan pondok pesantren (ponpes) se-Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Salah satu agenda pertemuan asosiasi pesantren NU se-Indonesia itu adalah membahas munculnya ideologi transnasional yang dinilai mengancam tradisi keserjanaan dan keagamaan pondok pesantren.

Wakil Ketua Pimpinan Pusat RMI NU Abdul Adhim mengatakan, “Ideologi transnasional atau ideologi impor dari luar negeri itu dinilai telah mengancam keutuhan bangsa dan pesantren. Karena, ideologi tersebut kebanyakan tidak sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Islam Indonesia yang didakwahkan Walisongo itu *‘kan* penuh semangat toleransi dan santun. Nah, ideologi Islam transnasional itu datang dengan tidak santun, dengan teriak Allahu Akbar sambil pecahkan kaca,” ujar Adhim.²⁸

27. Kantor Berita Nasional Antara, 15 Oktober 2006.

28. “RMI Kumpulkan Pimpinan Ponpes se-Indonesia Bahas ‘Ancaman’ Ideologi Transnasional,” lihat *NU Online*, Rabu, 16 Mei 2007.

Karena itu, menurut Adhim, organisasi yang menghimpun 14 ribu pondok pesantren NU se-Indonesia itu merasa turut bertanggung jawab atas keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menghadapi masuknya ideologi impor dimaksud.

Sebelumnya, majelis-majelis taklim yang berada di bawah organisasi NU yang biasa mengkoordinasi pengajian (kaum ibu, bapak, atau remaja) juga tidak luput dari penyusupan kelompok-kelompok garis keras yang membawa paham transnasional dari Timur Tengah (Wahabi-Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir). Untuk menghadapi gempuran garis keras ini, NU telah mengkoordinasi anggotanya untuk memperkuat kembali paham Aswaja yang dianut NU agar kaum Nahdliyin tidak mudah terhasut oleh kelompok garis keras. Pada bulan Agustus tahun 2006 LDNU mengadakan pertemuan yang diikuti oleh 162 Ketua Majelis Taklim se-Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi). Menurut Ketua Umum LDNU KH. Nuril Huda, pertemuan tingkat Jabotabek itu hanya permulaan. Nantinya akan dilakukan di daerah-daerah, terutama daerah di luar Jawa. Karena, fenomena penyusupan garis keras tidak terjadi di wilayah Jabotabek saja, melainkan juga di seluruh Indonesia.²⁹

NU memandang kelompok-kelompok garis keras bukan hanya berbahaya bagi NU namun juga bagi bangsa Indonesia. Itu sebabnya, NU menyerukan agar pemerintah mencegah masuknya ideologi garis keras yang bercorak transnasional atau lintas negara itu ke Indonesia, walaupun seruan ini tampaknya masih bertepuk sebelah tangan. Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi menjelaskan bahwa dirinya telah mengunjungi berbagai negara di Barat dan Timur untuk mengkampanyekan bahwa Islam merupakan agama, bukan ideologi, dan yang terjadi di Timur Tengah selama ini bukan Islam sebagai agama, tapi sebagai ideologi. “Ideologi Islam Timur Tengah antara lain Ikhwanul Muslimin, Majelis Mujahidin, Al-Qa-

29. “Rebut Kembali Masjid Nahdliyyin, LDNU Kumpulkan Majelis Ta’lim se-Jabotabek,” lihat, *NU Online*, 24 Agustus 2006.

eda, dan sebagainya. Tapi ideologi Islam itu bukan Islam, karena Islam sebagai agama bukan bersifat gerakan kepentingan, apalagi politis,” ujar Hasyim.³⁰

Oleh NU, ide Khilafah Islamiyah atau pun Negara Islam yang dikampanyekan oleh kelompok-kelompok garis keras ke dalam Islam Indonesia dipandang sebagai ancaman bagi keutuhan NKRI. Lebih prinsip lagi, menurut NU, ide Khilafah Islamiyah atau pun Negara Islam tidak memiliki dasar teologis di dalam al-Quran maupun Hadits. Pandangan ini diputuskan oleh NU setelah melakukan *Bahtsul Masa'il* (forum pembahasan masalah agama—*red.*) dalam sebuah Mukernas di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Jawa Timur, selama tiga hari pada pertengahan November 2007 yang dihadiri oleh 500-an kyai NU.

Selain meneliti teks-teks al-Quran dan Hadits terkait gagasan negara Islam, forum *Bahtsul Masa'il* juga meneliti sejumlah referensi khazanah intelektual Muslim yang eksistensinya diakui dan diterima sebagai otoritatif (*mu'tabar*), seperti *Attasyri' alJinâ'i al-Islâmî*, *al-Qaish al-Hâmî' al-Asyarqi*, *Jâm'ul Jawâmi'*, *Ad-Dîn Waddaulah wa Tatbîqis Syari'ah*, dan *al-Fiqhul Islâmî*. Kesimpulannya, forum *Bahtsul Masa'il* tidak melihat adanya dasar teologis tentang ide pendirian Negara Islam atau Khilafah Islamiyah.³¹ “Jadi, upaya-upaya untuk mengganti NKRI dengan negara Islam jelas dilarang, terlebih lagi jika upaya tersebut akan mendatangkan lebih banyak masalah bagi bangsa ini,” demikian bunyi rekomendasi *Bahtsul Masa'il*.³²

Walhasil, tokoh-tokoh NU sepakat menolak ide negara Islam. Bukan hanya itu, mereka juga menyerukan kepada pemerintah dan para pemimpin agama agar mewaspadaikan ideologi transnasional yang mengancam keutuhan bangsa, ideologi negara (Pancasila), dan NKRI. “Selama ini gerakan tersebut (garis keras—*red.*) telah

30. “PBNU Desak Pemerintah Cegah Ideologi Transnasional,” lihat *NU Online*, 29 April 2007.

31. Lihat Lampiran 2 buku ini.

32. “Caliphate not part of Koran: NU,” lihat *Jakarta Post*, 25 November 2007.

sering menyerang kita. Kini saatnya kita menyerang balik mereka,” ujar KH. Ali Maschan Moesa, Ketua Tanfidziah NU Jawa Timur, dalam konferensi tersebut.³³

Bagi NU, gagasan negara Islam merupakan penafsiran yang keliru terhadap pemahaman istilah Islam *kaffah* (menyeluruh) yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kewajiban pendirian Pemerintahan Islam. Syariat atau hukum Islam memang harus diamalkan, tapi tak perlu melalui kekuasaan atau pemerintahan Islam. Kaum Muslim di sebuah negara memang berkewajiban melaksanakan setiap ajaran Islam. Namun demikian, kewajiban itu tak berlaku bagi upaya pendirian Pemerintahan Islam. “Ber-Islam dengan sungguh-sungguh tak harus dengan Khilafah Islamiyah. Mengakui dan taat pada pemerintahan yang sah dan berdaulat adalah wajib,” ungkap Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi, seraya menjelaskan bahwa dua kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, hingga saat ini tak pernah menghendaki negeri ini dibangun dengan dasar sebuah agama tertentu, termasuk agama Islam.³⁴

NU tidak hanya menyorot penyusupan ideologi Khilafah Islamiyah yang dikampanyekan Hizbut Tahrir Indonesia, tapi juga penyusupan paham Wahabi dan Ikhwanul Muslimin yang sama-sama mengancam keutuhan NKRI dan berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Ketua Pengurus Pusat Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) KH. Imam Ghozalie Said menengarai bahwa kelompok-kelompok garis keras yang belakangan ini banyak bermunculan pada umumnya merupakan penganut paham Wahabi baru. “Kelompok-kelompok ini tidak suka dengan tradisi yang dijalankan oleh NU, seperti tahlil,” ujarnya.³⁵

33. Baca Lampiran 2 buku ini, lihat pula dalam *Jakarta Post*, *ibid*.

34. “PBNU: Khilafah Islamiyah Celakakan Muslim Minoritas di Negara Lain,” lihat *NU Online*, Kamis, 26 Juli 2007.

35. KH. Imam Ghozalie Said: “Ideologi Transnasional Sukses, Indonesia

Pandangan politik dari kelompok-kelompok ini, lanjut Said, adalah Hadits Nabi: ‘Barangsiapa yang meninggal dan tidak pernah berbaiat khalifah, maka ia mati seperti matinya orang jahiliyyah!’ (*man mât wa lam yabi‘ fa-qad mâta mîtatal-jâhiliyyah*).³⁶ Kelompok Ikhwanul Muslimin juga menggunakan dalil senada, yaitu: ‘Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka termasuk golongan orang yang kafir.’³⁷ “Ini kan berat secara teologis. Kita ini dianggap tidak Islam lagi karena tidak ikut paham mereka,” paparnya.³⁸ Lebih jauh Said menjelaskan, doktrin gerakan Ikhwanul Muslimin berasal dari Sayyid Qutb yang ditulis dalam bukunya yang terkenal, yaitu *Ma’alim fi at-Tariq* yang di antaranya menyatakan, ‘suatu negara yang tidak memberlakukan syariat Islam, berarti negara itu jahiliyah.’

Reaksi keras NU terhadap kelompok-kelompok garis keras telah mematahkan mitos bahwa *silent majority* atau kelompok mayoritas pada umumnya hanya bisa berdiam diri dalam menghadapi minoritas garis keras yang vokal dan agresif. Meski ancaman garis

Berubah Total,” lihat, *NU Online*, Jumat, 22 Juni 2007.

36. Hadits ini disampaikan dalam konteks kewajiban mengangkat pemimpin, bukan dalam hal kewajiban mendirikan Negara Islam. Karena hanya orang bodoh (*jâhiliyyah*) yang tidak akan menyusun tatanan sosial tanpa pemimpin, tanpa pemerintahan. Hadits yang lazim dikutip dalam konteks ini adalah pernyataan Nabi, “Siapa pun di antara kalian, satu orang atau lebih, yang bepergian, maka wajib menentukan pemimpin.”

37. Ayat ini berada dalam satu rangkaian kecaman terhadap siapa pun yang mengamalkan ajaran agama secara parsial, hanya memilih yang sesuai dengan kepentingan dan kecenderungan pribadinya, bahkan memutarbalikkan pesan-pesan agama semata demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Mereka dikanal sebagai *zhâlim*, *fâsiq*, dan *kâfir*. Nabi pernah menjelaskan bahwa umat-umat terdahulu telah mengalami kehancuran karena dalam mengamalkan ajaran agamanya mereka lebih berdasarkan kepentingan dan kecenderungan pribadi dan kelompoknya, bukan ketaatan sejati kepada pesan agama. Di tangan kelompok garis keras, ayat ini telah —secara keliru— dipahami sebagai kewajiban formalisasi sistem hukum dan bentuk negara.

38. KH. Imam Ghozalie Said, *ibid*.

keras itu semula tertuju kepada paham dan eksistensi NU, namun NU menganggap itu merupakan ancaman terhadap bangsa dan negara. Sebab tradisi keberagamaan NU merupakan amal keagamaan yang dipraktikkan oleh mayoritas umat Islam Indonesia, sehingga secara ringkas bisa dikatakan bahwa warga NU dan bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. NU menyadari bahwa setiap bahaya yang mengancam kelestarian Pancasila dan keutuhan NKRI, adalah juga ancaman terhadap dirinya. NU juga memahami bahwa setiap ancaman pada dirinya, kelak akan menjadi bahaya bagi NKRI. Sebagai *indigenous* Islam atau Islam pribumi yang telah menyatu dengan denyut nadi budaya masyarakat Indonesia, NU menilai gerakan dan ideologi transnasional tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan budaya Indonesia yang damai. “Kelompok-kelompok Islam yang berideologi transnasional itu di negara asalnya sendiri kerap melahirkan konflik. Sehingga, jika bangsa Indonesia mengikutinya, maka akan ikut menjadi bagian dari masalah mereka, selain itu karena memang tidak sesuai dengan budaya setempat.”³⁹

Sebagaimana Muhammadiyah, NU telah menganggap Pancasila dan UUD 1945 sebagai konsensus nasional yang sudah final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. NU juga telah menganggap NKRI sebagai bentuk final bagi bentuk negara Indonesia. Sebagai ormas Islam terbesar di dunia, NU merasa bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara. Karena itu, sikap dan reaksi NU yang sangat tegas terhadap kelompok-kelompok garis keras yang mengusung ideologi negara Islam bisa dimengerti. Sebab ancaman terhadap NU, berarti juga merupakan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia, dan sebaliknya.

Menghadapi ancaman kelompok-kelompok garis keras yang banyak bermunculan akhir-akhir ini, NU dan Muhammadiyah se-

39. “PBNU Minta Bangsa Indonesia tak Ikuti Ideologi Transnasional,” lihat, *NU Online*, Selasa, 15 Mei 2007.

bagai dua ormas Islam terbesar di Indonesia sepakat untuk membandung gerakan mereka sekaligus menggalang kekuatan untuk terus mengkampanyekan Islam moderat.⁴⁰ Kedua ormas ini mengabarkan kepada dunia bahwa kelompok-kelompok garis keras sesungguhnya tidak merepresentasikan Islam. Mereka malah membajak Islam untuk kepentingan politik kelompok mereka sendiri.

Infiltrasi di Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menguatnya peran MUI akhir-akhir ini patut mendapatkan perhatian khusus. Kevokalan MUI dalam menyuarakan berbagai pandangan dan tuntutan juga paralel dengan kecenderungan ini. Yang membuat MUI lebih kuat dari ormas keagamaan umumnya adalah karena keterkaitan langsung lembaga agama bikinan Orde Baru ini dengan pemerintah. Karena sejak awal didirikannya diniatkan sebagai instrumen pemerintah otoriter untuk menyangga kekuasaan dan menjinakkan gerakan keagamaan anti pemerintah, maka ia memiliki fasilitas yang sangat besar. Ia, misalnya, memiliki cabang di seluruh Indonesia, secara formal dari kabupaten, propinsi hingga pusat dan memiliki struktur informal di tingkat kecamatan. Seluruh struktur tersebut mendapatkan biaya dari negara. Sementara di pihak lain, MUI bisa mencari dana tambahan dari proyek-proyek keagamaan yang diciptakannya tanpa dikontrol oleh pemerintah dan publik, seperti dari sumber proyek labelisasi halal untuk makanan, kedudukannya yang penting dalam Bank Syari'ah di seluruh perbankan yang membuka gerai Syari'ah, serta proyek-proyek politik tertentu dari pemerintah seperti sosialisasi RUU tertentu yang berkaitan dengan isu agama.⁴¹

Ormas Islam apa pun yang doktrin dan akidahnya benar menu-

40. "Major Muslim groups spearhead moderate campaign," *Jakarta Post*, 22 Juni 2006.

41. Ahmad Suaedy dkk. Kata Pengantar: "Fatwa MUI dan Problem Otoritas Keagamaan" dalam *Kala Fatwa Jadi Penjara* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. x-xxv.

rut MUI, maka bisa bergabung dan punya wakil di dalamnya tanpa mempertimbangkan jumlah anggota organisasinya. Akibatnya, wakil organisasi besar dan moderat seperti NU dan Muhammadiyah tidak representatif dibandingkan dengan gerakan garis keras kecil yang anggotanya hanya puluhan ribu saja. MUI memiliki hak prerogatif untuk menentukan sah dan tidak, benar dan sesatnya suatu keyakinan untuk menjadi anggota. Ahmadiyah, misalnya, karena dianggap menyimpang, bukan hanya tidak bisa masuk menjadi anggota, MUI bahkan mendesak pemerintah untuk melarangnya (MRoRI-WI No. 4). Sementara, betapa pun subversifnya secara politik, jika MUI menilai tidak ada penyimpangan, akan diakomodasi. Salah satu contoh paling memprihatinkan adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam doktrinnya, HTI menyatakan sebagai organisasi politik yang anti demokrasi, atau dalam bahasa agama mengharamkan demokrasi dan memperjuangkan Khilafah Islamiyah. HTI mengaku dan berusaha melenyapkan Pancasila dan meruntuhkan NKRI. Dengan demikian, dari sudut manapun HTI gerakan subversif, namun keberadaannya diakomodasi oleh MUI, bahkan anggota HTI menggurita di dalam struktur MUI dari pusat sampai daerah.⁴² Tidak bisa dibayangkan jika suatu saat HTI menjadi besar dan hampir pasti akan berhadapan dengan eksistensi Indonesia sebagai negara bangsa.

Sistem keanggotaan MUI yang demikian, serta lemahnya orientasi dan pengamalan spiritual di antara kebanyakan anggotanya, membuat produk-produk dan fatwa yang dikeluarkannya sejalan dengan arus gerakan garis keras. Ini disebabkan karena wakil ormas-ormas Islam yang moderat tidak banyak meskipun dihitung dari jumlah anggotanya sangat besar. Karena inilah, MUI menjadi salah satu target utama penyusupan para agen garis keras dan alat mereka dalam usaha menegakkan ideologi dan mewujudkan agenda politik mereka.

Akibat selanjutnya adalah bahwa organisasi Islam dengan dok-

42. Ibid.

trin apa pun, termasuk organisasi dan gerakan fundamentalis yang anti demokrasi dan anti Pancasila sekali pun, terkecuali yang secara nyata dicap sebagai teroris seperti Jamaah Islamiyah (JI), bisa menjadi anggota dan mendominasi MUI. Dari kenyataan demikian, MUI sesungguhnya bisa dikatakan sebagai bunker dari organisasi dan gerakan fundamentalis dan subversif di Indonesia.⁴³ Lebih dari itu, karena MUI dibiayai oleh pemerintah, maka organisasi dan gerakan fundamentalis juga mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui MUI tersebut untuk tujuan mereka menghancurkan dasar negara. Pemerintah, dengan demikian, melakukan *capacity building* gerakan fundamentalis dan radikal, bahkan yang anti Pancasila, UUD 1945, dan NKRI sekalipun.

Gagasan MUI untuk memisahkan produk halal dari produk haram di tempat-tempat perbelanjaan, dengan jelas akan menjadi langkah menunjukkan secara telanjang kepada publik: siapa yang muslim dan siapa yang bukan, yang akan dengan mudah diketahui ketika mereka berbelanja. Terkait labelisasi halal dan haram ini, logika MUI berlawanan arus dengan logika al-Qur'an dan al-Hadits. Al-Qur'an dan Hadits hanya menjelaskan hal-hal yang diharamkan, bukan sebaliknya, seperti diteorikan oleh para *fuqaha* bahwa *kull syai'in halâl illâ ma hurrîma* (apa pun halal kecuali yang diharamkan). Mungkin mereka tidak merasa, atau merasa tapi labelisasi halal pasti lebih menguntungkan daripada labelisasi haram.

Masalah MUI ini menguat secara mencolok sejak lima tahun terakhir ini, karena penguasa tampak lebih dekat dengan partai-partai garis keras yang setia mendukungnya, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PBB (Partai Bulan Bintang). Apakah kedekatan penguasa dengan kelompok-kelompok garis keras ini karena alasan oportuniste atau memang memiliki agenda yang sama dengan mereka, hanya Allah swt. yang tahu. Seandainya karena oportuniste atau tidak mengerti sama sekali tentang semua masalah yang mengancam bangsa ini, semoga Allah swt mengilhami mereka lebih

43. <http://www.wahidinstitute.org/indonesia/content/view/718/52/>

mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada hidup yang hanya sementara dan fana di dunia ini.

Kaitan penguasa lima tahun terakhir ini dengan partai-partai garis keras yang terbuka dan tersembunyi hendak menegakkan pen-
dasarannya negara pada Syari'ah Islam, diperkuat dengan diangkatnya ketua dan juru bicara MUI yang paling vokal menentang pluralisme, kebebasan beragama dan keyakinan, K.H. Ma'ruf Amin, sebagai anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) bidang keagamaan. Dengan demikian, cukup jelas ke mana arah pandangan dan *policy* pemerintah dalam bidang keagamaan, kebebasan beragama dan keyakinan.⁴⁴ Begitu gegap-gempitanya penyesatan dan kekerasan antaragama, tapi hampir tidak pernah terdengar suara tegas penguasa agar aparat negara lebih tegas dan adil terhadap pelaku kekerasan agama serta keberpihakannya untuk melindungi para korban penyesatan dan kekerasan. Hampir tidak pernah pula terdengar suara tegas penguasa tentang keinginannya untuk menegakkan hak-hak asasi manusia dan konstitusi dalam jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Sebaliknya, penguasa justru menunjukkan dukungannya secara eksplisit dan hendak mengikuti semua keputusan MUI, walaupun tidak merefleksikan atau mewakili pikiran moderat mayoritas ulama dan umat Islam Indonesia. Lembaga semi pemerintah yang didirikan oleh rezim Orde Baru untuk mengontrol umat Islam saat itu, kini telah tampak berbalik mendikte/mengontrol pemerintah. Pada Rakernas tersebut MUI mengeluarkan fatwa 10 kriteria aliran sesat sebagai pedoman masyarakat Muslim untuk memantau secara mandiri aliran-aliran sesat. Akibatnya sudah jelas, makin tak terkendalinya kekerasan antaragama yang cenderung liar.

44. Van Zorge Report, January 29, 2008.

Infiltrasi di Lembaga-lembaga Pendidikan

Seorang murid kelas 4 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Bekasi, Jawa Barat, menyebut orangtuanya kafir karena ia masih duduk di depan televisi saat azan berkumandang di *loud speaker* masjid. Tentu saja si orangtua terkaget-kaget dari mana anak kesayangannya memperoleh kosa kata “kafir” dan mengalamatkan kepada dirinya.⁴⁵ Di Ciputat, Tangerang, seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) menuding ibunya akan masuk neraka karena tidak memakai jilbab sebagaimana yang ia kenakan karena suruhan gurunya di sekolah.

Beberapa responden di lokasi penelitian menyebutkan bahwa anak-anak mereka kini lebih keras dalam soal agama, seperti dengan mudah menyebut kata “kafir” kepada orang lain. “Sebagai orangtua tentu saja saya ingin anak saya kelak menjadi orang yang saleh, tapi saya juga tidak mau anak-anak saya bersikap fanatik dan diajari membenci orang lain, apalagi orangtua sendiri, hanya karena pemahaman agama.”⁴⁶

Ungkapan-ungkapan seperti “kafir” dan “masuk neraka” adalah ungkapan keras yang sebenarnya tidak lazim digunakan dalam kehidupan beragama umat Islam Indonesia. Dulu, ungkapan itu hanya dialamatkan kepada kaum penjajah dengan tujuan untuk memberi legitimasi moral keagamaan untuk melawan dan mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Di masa perkembangan Islam di tanah Arab, kelompok yang gemar menuding orang Islam lain sebagai kafir adalah kelompok Khawarij yang mengkafirkan Sayyidina Ali dan Muawiyah serta para sahabat yang sejalan dengan keduanya. Sekalipun sebagai sekte Khawarij sudah tidak ada, namun kebiasaan buruknya diwarisi oleh banyak gerakan garis keras untuk mendiskreditkan siapa pun yang tidak sejalan —atau bahkan ber-

45. Wawancara dengan seorang responden di Bekasi, Jawa Barat, 11 Februari 2008.

46. Wawancara dengan seorang responden di Ciputat, Tangerang, Banten, 20 November 2007.

tentangan— dengan mereka. Wahabi disebut-sebut sebagai pewaris sejati dimaksud.

Benarkah kini anak-anak kita telah mewarisi ajaran kaum Khawarij (Wahabi) yang mudah mengkafirkan orang lain? Jika benar, bagaimana teologi radikal dari Arab Saudi dan gerakan garis keras dari Timur Tengah tersebut bisa menyusup dan mencuci otak anak-anak kita? Ini isu penting yang telah menyita perhatian banyak kalangan dalam sepuluh tahun terakhir, ketika mulai banyak bermunculan kelompok-kelompok garis keras bercorak Timur Tengah yang tak kenal kompromi dalam memaksakan agenda-agenda mereka, dengan penghujatan, teror, dan penyerangan kepada yang lain yang dianggap “kafir”. Mereka tampaknya lupa pada hadis shahih dari Nabi Muhammad saw. (sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya) bahwa: “Siapa pun yang mengkafirkan saudaranya tanpa penjelasan yang nyata, adalah dia sendiri yang kafir” (*man kaffara akhâhu bi-ghairi ta’wil-fa-huwa kamâ qâla*).⁴⁷ Atau dalam riwayat lain, “Siapa pun yang mekafirkan saudara, maka salah seorang darinya benar-benar kafir” (*man kaffara akhâhu-fa-qad bâ’a bihâ ahaduhâ*).⁴⁸

Terkait dengan soal bagaimana proses kontaminasi teologis terhadap anak-anak dan generasi muda itu dilakukan, kasus-kasus di atas mengingatkan kita pada fenomena serupa pada tahun 1980-an ketika banyak orangtua yang cemas melihat anak-anaknya tiba-tiba rajin beribadah tapi pada saat bersamaan memisahkan diri dari pergaulan. Anak-anak perempuan mereka memakai jilbab tertutup yang berbeda dengan kerudung Muslim khas Melayu; sebagian bahkan ada yang menutup seluruh bagian tubuhnya dengan kain hitam dan hanya menyisakan matanya saja, bahkan ada yang matanya pun ditutup dengan sejenis kain kasa. Anak laki-

47. Hadits riwayat Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid xx, Bab 73 (Mesir: Mauqif Wizârat al-Auqâf, t.t.), h. 259.

48. Hadits riwayat Ahmad ibn Hanbal, *Masnad Ahmad*, Bab Masnad ‘Abdullah ibn ‘Umar, jilid xiii (Mesir: Mauqif Wizârat al-Auqâf, t.t.), h. 455.

laki memelihara jenggot dan menghitamkan jidat. Itu merupakan masa ketika kelompok-kelompok *usroh* atau *tarbiyah* menjamur di kampus-kampus menawarkan satu pandangan keagamaan yang fanatik serta seolah lebih saleh dan taat dibandingkan orang lain di sekitarnya.⁴⁹

Saat ini, gejala radikalisasi keagamaan tidak hanya berhenti di kampus-kampus tapi sudah masuk pula ke sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah. Cerita anak yang mengkafirkan orangtuanya sendiri hanya contoh kecil bagaimana agen-agen garis keras telah berhasil mempengaruhi cara pandang keagamaan anak-anak dan remaja usia sekolah. Jika di perguruan-perguruan tinggi ada LDK (lembaga dakwah kampus) yang merupakan bentukan kelompok Tarbiyah Ikhwanul Muslimin dan hingga kini masih menjadi ajang rekrutmen kelompok ini, maka di sekolah-sekolah tingkat menengah, rekrutmen dilakukan melalui Badan Rohani Islam atau Rohis, yang merupakan satu-satunya organisasi pelajar Islam yang boleh beraktivitas di sekolah negeri/umum.

Para pelajar sekolah umum biasanya tidak memiliki pengetahuan agama yang mendalam, sebagaimana agen-agen garis keras yang sebenarnya mempunyai pemahaman yang dangkal tentang Islam. Akibatnya, mereka cenderung mudah tertarik dengan tawaran “Islam harakah” atau Islam gerakan yang ditawarkan kelompok Tarbiyah Ikhwanul Muslimin. Ini juga sebenarnya yang terjadi dengan kampus-kampus umum di mana mahasiswanya mudah jatuh cinta pada “Islam harakah”. Para pelajar dan mahasiswa kurang memiliki pemahaman agama yang mendalam sebagaimana anak-anak pesantren. Pada anak-anak pesantren, pengajaran agama diberikan secara komprehensif karena tujuannya memang menuntut ilmu, sehingga anak-anak santri cenderung memiliki perspektif yang luas dan tidak mudah jatuh pada sikap hitam-putih dalam beragama. Sedangkan pada “Islam harakah”, agama hanya diajarkan satu di-

49. Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), h. vi.

mensi, yaitu ideologi, karena tujuannya politik. Dalam bahasa KH. A. Mustofa Bisri, bab yang dipelajari oleh kelompok-kelompok semacam ini baru *bab al-ghadlab* atau bab marah. Padahal, dalam pelajaran agama masih banyak bab yang lain, seperti bab *shabr*, bab *tawâdlu'*, bab *qanâ'ah*, bab *tasâmuh*, dan lain-lain.⁵⁰

Melalui dua strategi, yaitu diseminasi ideologi dan kaderisasi, agen-agen garis keras masuk ke lembaga-lembaga pendidikan di semua tingkatan. Strategi *pertama*, penyelenggaraan program peribadatan, seperti training keislaman di sekolah-sekolah, yaitu training Islam pemula (*Islamic training for beginners*), bimbingan belajar, kursus-kursus bagi para pelajar dan mahasiswa, pelayanan buku-buku harakah atau gerakan, serta pelayanan penyediaan da'i gratis, termasuk menyediakan khatib gratis yang siap pakai untuk shalat Jumat. Strategi *kedua*, kaderisasi. Gerakan ini melakukan latihan-latihan yang intensif untuk anak-anak, remaja dan mahasiswa yang bakal dibina untuk menjadi kader gerakan. Latihan-latihan khusus, seperti Studi Islam Intensif, Latihan Mujahid Dakwah dan Pembina, dilakukan secara berjenjang dan intensif.

Kelompok-kelompok garis keras telah berhasil menyiapkan dan melatih kader-kadernya untuk menjadi aktivis dalam berbagai bidang dan disebar di masyarakat, termasuk lembaga-lembaga pendidikan yang dianggap sangat strategis untuk menyiapkan kader masa depan. Beberapa pola kegiatan lain yang bisa dikenali secara terbuka antara lain menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan keagamaan maupun pelatihan keterampilan umum lainnya bagi mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum. Semua pola itu mudah dikenali karena memiliki ciri yang khas yaitu metode tarbiyah yang menjadi karakteristik gerakan Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah.

Untuk masyarakat umum, penyediaan kader terlatih seperti khatib, guru ngaji, dosen, dokter, biasanya dilakukan dengan komando terpusat. Gerakan ini juga menyediakan tenaga terlatih un-

50. KH. A. Mustofa Bisri, diskusi di The Wahid Institute, 28 Januari 2008.

tuk pendidikan kerumah-tangga-an, seperti masak-memasak yang beroperasi dari rumah ke rumah, bahkan penyediaan *cleaning service* gratis di masjid. Biasanya, jika agen gerakan ini telah dipercaya memegang suatu lembaga seperti masjid atau pengajian dan pendidikan dalam masyarakat, maka yang dilakukan kemudian ialah pembersihan terhadap pihak mana pun yang tidak mendukung paham dan ideologi mereka, dan mengundang teman-temannya untuk mengisi struktur yang sudah dibersihkan.

Saat ini banyak sekali masjid, sekolah-sekolah Islam dari tingkat paling rendah yaitu taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi telah berhasil dimasuki oleh para agen gerakan tersebut. Di kota-kota di Indonesia bisa ditemukan dengan mudah pamflet atau iklan di surat kabar mengenai ustadz atau guru ngaji yang siap memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk khutbah, ceramah atau bimbingan keluarga. Mereka juga menyediakan tenaga untuk bimbingan keagamaan (Islam) bagi pelajar dan mahasiswa selain bagi masyarakat umum.

Selain menjangkau lembaga-lembaga formal yang telah lebih dulu berdiri, kelompok ini juga berusaha mendirikan sendiri sekolah-sekolah Islam yang mempunyai ciri khas, yang biasanya mereka namakan Sekolah Islam Terpadu (SIT). Sekolah semacam ini telah berhasil didirikan di berbagai kota di Indonesia dengan obyek utamanya para murid dari tingkat kanak-kanak (TK) hingga sekolah tingkat atas (SMU). Belakangan Taman Kanak-Kanak TK Islam Terpadu (TK-IT) yang jumlahnya ratusan itu telah mampu bersaing dengan TK-Raudhatul Athfal (milik Muslimat NU) dan TK-ABA (milik Aisyiyah-Muhammadiyah). Dalam hal ini, ada satu kasus menarik. Pada tahun 2006 sebuah TK milik Aisyiyah Muhammadiyah di Prambanan yang telah berdiri 20 tahun hendak diubah menjadi TK Islam Terpadu, dengan dukungan dari Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, selaku Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan Islamic Centre yang berafiliasi dengan PKS. Tentu saja pihak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

Jateng keberatan dengan rencana tersebut sekalipun dengan alasan akan dibangun Islamic Center. Gagal diakuisisi oleh PKS, TK Aisyiyah tersebut tetap berdiri sampai sekarang.

Keberadaan kelompok Tarbiyah Ikhwanul Muslimin (PKS) di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah mulai terkuak tak kala Farid Setiawan, pengurus Muhammadiyah wilayah Yogyakarta, menulis sebuah artikel opini di Majalah *Suara Muhammadiyah*. Dalam artikel berjudul "Tiga Upaya Mu'alimin dan Mu'alimat" itu Farid mensinyalir terjadinya penyusupan agen-agen garis keras di Madrasah Muallimin dan Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. Kedua lembaga pendidikan menengah ini dikenal sebagai tempat pengkaderan ulama Muhammadiyah yang langsung dikelola oleh Pimpinan Pusat.

Lebih lengkap, Farid Setiawan menulis:⁵¹

... transformasi ideologi di kedua madrasah tersebut (Muallimin dan Muallimat, *ed.*) lama-kelamaan mulai memudar ... karena mewabahnya "virus *tarbiyah*" yang makin menggurita. "Virus *tarbiyah*" tersebut sebagian besar memasuki urat nadi kepengurusan madrasah, dari guru sampai pendamping asrama yang biasa disebut *musyrif* dan *musyrifah*.

Memang, virus ini secara kasat mata tidak dapat dilihat dengan jelas, namun yang pasti "kegenitan politik" dalam berafiliasi terhadap salah satu partai dan *manhaj* lain menjadikan para pengurus, guru, *musyrif* dan *musyrifah*-nya semakin menampakkan gerakan yang berbeda dengan Muhammadiyah. Mereka cenderung menggunakan gerakan baru non-Muhammadiyah dalam mengembangkan gerakan dan kepentingan politiknya.

Dalam bentuk kaderisasi, mereka cenderung mengguna-

51. Farid Setiawan, "Tiga Upaya Mu'allimin dan Mu'allimat," *Suara Muhammadiyah*, 3 April 2006.

kan sistem yang berbeda dengan Muhammadiyah seperti *Daurah, Liqa', Usrah, Daulah Islamiyah* serta doktrin *Jihad fi Sabilillah* yang diambil sebagai jargon suci dalam membakar semangat kader. Para fungsionaris “virus *tarbiyah*” tersebut sangat intens dalam membina, mendampingi serta mendidik santri-santri madrasah, untuk kepentingan menjaring kader-kader partainya.

Bagaimana kader-kedar Muhammadiyah yang berhasil direkrut dan dibina oleh gerakan Tarbiyah (PKS) menjadi kader mereka, dan bagaimana perbenturannya dengan Muhammadiyah yang moderat? Farid melanjutkan analisisnya:

Produk keluaran dari pola kaderisasi yang dilakukan “virus *tarbiyah*” tersebut membentuk diri serta jiwa para kadernya menjadi seorang berpemahaman Islam yang ekstrem dan radikal. Sehingga wajar kalau terjadi paradoks gerakan dengan dinamika Muhammadiyah yang dikenal moderat. Perbenturan paham Islam radikal dengan Islam moderat makin tampak dan kian meruncing seiring dengan berkembangnya gerakan “virus *tarbiyah*” tersebut.

Perkembangan dari pola kaderisasi tersebut saat sekarang telah tersebar ke berbagai penjuru Muhammadiyah. Hal ini membuat kekecewaan yang cukup tinggi di kalangan warga dan Pimpinan Muhammadiyah di berbagai daerah. Putra-putri mereka yang diharapkan menjadi kader penggerak Muhammadiyah malah bisa berbalik seratus delapan puluh derajat, dan bahkan jadi memusuhi Muhammadiyah sendiri. Fenomena seperti itu juga menjadikan orang-orang di luar Muhammadiyah ikut berdukacita dan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas matinya sekolah kader Muhammadiyah yang selama ini

diunggul-unggulkan.

Suara Muhammadiyah secara berseri menurunkan opini terkait kasus penyusupan di dua lembaga pendidikan Muhammadiyah tersebut. Namun, beberapa peminan Muhammadiyah yang telah terpengaruh paham dan ideologi garis keras ternyata tidak senang dengan opini yang dikeluarkan oleh *Suara Muhammadiyah*. Polemik ini pun berbuntut panjang, dan berakhir dengan dikeluarkannya SKPP No 149 tentang Konsolidasi Organisasi PP Muhammadiyah, yang diedarkan secara nasional, yang melarang anggota Muhammadiyah memanfaatkan Muhammadiyah untuk kepentingan politik, dan secara khusus menyebut PKS.

Artikel Farid Setiawan ternyata telah ikut membantu persyarikatan Muhammadiyah mengatasi masalah yang membelitnya selama bertahun-tahun. Alasannya jelas karena Farid mau berterus terang, jujur, dan berani mengemukakan apa yang ia saksikan dan merugikan organisasi Muhammadiyah. Seharusnya ini menjadi inspirasi bagi yang lain melakukan hal yang sama, demi menyelamatkan Muhammadiyah dari penyusupan dan penggerogotan garis keras.

Sejak beberapa tahun belakangan ini, gerakan Tarbiyah Ikhwanul Muslimin ini juga mampu mengembangkan model pendidikan bergaya Arab dengan sponsor utama dari Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Sebagai contoh, kini telah berdiri beberapa Ma'had Ali (semacam lembaga kursus pendidikan keagamaan) di berbagai kota, lagi-lagi dalam kaitannya dengan universitas-universitas Muhammadiyah. Bahkan pada beberapa program studi di universitas tersebut seluruh mahasiswanya diberi beasiswa dan disuplai dengan dosen dari Arab Saudi secara langsung.

Sebagai misal, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dibuka kelas khusus Ma'had Abu Bakar, yang semua pembiayaan berasal dari Arab Saudi, dengan dosen-dosen Wahabi dari Arab Saudi dan dosen alumni Timur Tengah. Di UMY ini, bebe-

rapa dosen di Fakultas Fisipol, Teknik, Ekonomi dan Hukum, adalah aktivis HTI. Mereka menyusun program yang disebut Islamisasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan menyusun kurikulum Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, yang hanya boleh diajarkan oleh orang-orang tertentu, khususnya alumni Timur Tengah.

Dosen yang paling berpengaruh dalam perkuliahan di Ma'had Abu Bakar UMY adalah dua Ketua Muhammadiyah, keduanya alumni Universitas Ibn Saud Arab Saudi. Dalam sebuah tulisan Prof. Khaled M. Abou el Fadl, dinyatakan bahwa jaringan Universitas Ibn Saud memang dibiayai untuk melakukan penyebaran paham Wahabi ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, agar menjadi paham mayoritas di dunia Islam. Fadl juga menyebutkan bahwa sudah lebih banyak pengajar di Universitas Al-Azhar, Mesir, bermazhab Wahabi ortodoks konservatif yang mengikuti jejak tokoh radikal Ikhwanul Muslimin, yaitu Hassan al-Bana dan Sayyid Qutb. Sejak tahun 1990-an, kata Fadl, Wahabisme telah menjadi sistem pemikiran yang dominan di dunia Islam.⁵² (Lihat kembali penjelasan mengenai kombinasi paham Wahabi-Ikhwanul Muslimin ini dalam Bab II, *Latar Belakang Masalah: Penyusupan Ideologi Wahabi-Ikhwanul Muslimin di Indonesia*).

Peneliti kami diberitahu bahwa di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), gerakan penyusupan paham Wahabi-Ikhwanul Muslimin demikian kuatnya, terutama lewat Fakultas Teknik, Agama Islam, dan Program Magister Agama Islam, di mana ketuanya adalah Dewan Syuro PKS, Dr. Muinudinillah, Lc., lulusan King Abdul Aziz University, Arab Saudi. Dalam kelas Magister Studi Islam UMS, ada tiga kelas yang mendapatkan beasiswa dari Arab Saudi, dan buku-buku dari Arab menjadi bacaan wajib di kelas. Yang menarik adalah, kira-kira tiga per-empat mahasiswa S2 Studi Islam itu merupakan kader PKS yang dibawa oleh Direk-

52. Khaled M. Abou el Fadl, *Melawan "Tentara Tuhan,"* (Jakarta: Serambi, 2001), h. 22.

turnya dan mendapatkan beasiswa dari Kerajaan Arab Saudi.

Penelitian ini menemukan data bahwa di UMS, sekitar 60% dosennya adalah PKS, yang tersebar di seluruh fakultas. Dari 60% dosen tersebut banyak di antaranya adalah pejabat di UMS, karena itu menjadi persoalan yang tidak sederhana bagi Rektor UMS untuk mengimplementasikan SKPP Muhammadiyah dalam usaha menertibkan dengan memecat mereka, misalnya. Jika melakukan pemecatan maka UMS akan *collapse*, sebab dosennya habis. Demikian juga mahasiswanya, separoh dari mereka lebih dekat dengan PKS karena kampus UMS didominasi oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang merupakan sayap PKS, di samping itu banyak juga mahasiswa yang merupakan alumni dari pesantren Ngruki Pimpinan Abu Bakar Ba'asyir, Amir Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI).

Data di atas cukup mengejutkan, karena bisa terjadi bahwa di kampus milik Muhammadiyah para mahasiswanya lebih banyak anggota KAMMI (PKS) dan bukan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Padahal, Ketua BPH UMS adalah Drs. Dahlan Rais, M.Hum (adik kandung Amien Rais) dan Ketua PP Muhammadiyah. Sedangkan Wakil BPH adalah Drs. Marpuji Ali, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.

Dewasa ini sudah menjadi pemandangan umum bahwa PKS dan HTI sudah menguasai masjid-masjid kampus di Yogyakarta, termasuk masjid kampus UGM, UIN, Masjid Syuhada, Masjid Pascasarjana UGM, dan masjid kampus UMY. Masjid-masjid kampus menjadi ajang sosialisasi dan diseminasi kelompok Tarbiyah Ikhwanul Muslimin di perguruan tinggi. Dalam hal ini pihak universitas tidak bisa berbuat banyak karena sebagian gerakan Tarbiyah Ikhwanul Muslimin didukung oleh pejabat kampus.

Ada beberapa ketegangan yang muncul di kampus-kampus tersebut. Di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan UIN sering muncul penolakan dari mahasiswa dan dosen yang mengetahui bahwa kelompok Tarbiyah Ikhwanul Muslimin berusaha mema-

sukkan paham dan ideologi mereka pada saat khutbah Jumat dan pengajian mahasiswa, termasuk pada pengajian Ramadhan. Penolakan di UAD oleh beberapa dosen dan mahasiswa berakhir dengan pembubaran pengajian tersebut. Di masjid UIN Yogyakarta peristiwa pembubaran ini dilakukan oleh Takmir Masjid dan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sayap mahasiswa NU) karena kelompok Tarbiyah Ikhwanul Muslimin itu dianggap tidak memberikan ruang pada semua mahasiswa dan dosen UIN yang berbeda paham.

Lembaga-lembaga pendidikan telah lama menjadi ajang penyusunan gerakan garis keras, terutama karena kelompok-kelompok ini telah berhasil menguasai jaringan dan menempatkan kader-kader mereka di dalam struktur organisasi lembaga pendidikan bersangkutan. Kampus-kampus ternama seperti UI, ITB, IPB, UGM, Unpad, dan kampus-kampus besar di luar Jawa menjadi tempat yang subur bagi pengembangbiakan paham garis keras. Dalam Mata Kuliah Agama Islam, misalnya, para mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti mentoring. Jika tidak mau ikut, jangan harap bisa memperoleh nilai tinggi dalam Mata Kuliah Agama Islam tersebut. Adapun para mentornya tidak lain adalah kader yang memang sudah diatur oleh LDK (Lembaga Dakwah Lampung) yang juga sudah dikuasai kelompok garis keras.

Di Medan, Sumatera Utara, dari 34 mahasiswa aktivis LDK yang menjadi responden penelitian, 31 orang di antaranya menolak demokrasi dan setuju mendirikan sistem Khilafah Islamiyah di Indonesia, proyek utama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Di Bandung, dari 32 responden mahasiswa, 4 di antaranya adalah aktivis LDK dan semuanya setuju Khilafah Islamiyah dan menolak demokrasi. Sebagai perbandingan, 5 responden aktivis KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) di Bandung setuju demokrasi tapi pada saat bersamaan juga setuju Khilafah Islamiyah. 5 Aktivis KAMMI di Bogor yang menjadi responden penelitian juga setuju demokrasi dan pada saat bersamaan setuju dengan Khila-

fah Islamiyah. Ini tidak mengagetkan karena KAMMI merupakan *underbouw* PKS yang juga menerima demokrasi. Dengan kata lain, agenda HTI untuk memperjuangkan khilafah Islamiyah di Indonesia rupanya telah masuk ke lingkungan pendidikan dan didukung oleh para aktivis LDK dan KAMMI.

Infiltrasi di Instansi-Instansi Pemerintah dan Swasta

Dewasa ini kita sering mendengar ungkapan seperti: “Saat ini tidak ada lagi yang bercita-cita mendirikan negara Islam,” atau, “Stigma negara Islam sengaja ditiupkan oleh kelompok-kelompok yang anti-Islam,” dan seterusnya. Namun, pada kenyataannya, kita mendengar kerisauan banyak pihak atas berbagai indikator yang mengarah kepada formalisasi agama dalam bentuk negara Islam, mulai dari tuntutan kembali ke Piagam Jakarta hingga bermunculannya Perda-perda Syari’ah di berbagai daerah di tanah air. Kalau ada yang menunjukkan bahwa itu merupakan indikator ke arah perwujudan negara Islam, maka dia akan cepat dituduh mengidap penyakit Islamophobia atau anti-Islam. Padahal tidak demikian, dia justru mengungkapkan yang sebenarnya, sebagaimana dibuktikan studi ini.

Kasus ini pernah menimpa Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Pada tahun 2006, Menhan Juwono mengungkapkan adanya penyusupan gerakan radikal ke dalam partai-partai Islam yang ingin mendirikan negara Islam untuk menerapkan syari’ah. Menurut Menhan, gerakan radikal itu menunggu saat yang tepat untuk terciptanya radikalisisasi. Menhan menambahkan, pendirian negara Islam untuk menerapkan syariah akan membuat partai-partai Islam berseteru, karena interpretasi syari’ah berbeda-beda antarparpol Islam. Menhan kemudian meminta parpol Islam untuk waspada terhadap penyusupan itu.⁵³

Atas pernyataannya itu, Menhan menerima badai protes dari kalangan aktivis partai. Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera

53. *Republika*, 7 Oktober 2006.

(PKS), Tifatul Sembiring menyebut pernyataan Menhan itu hanya memberi stigma negatif kepada partai-partai Islam. Tuduhan seperti itu, kata dia, mirip cara-cara yang digunakan Orde Baru. Reaksi keras juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya, Menhan tidak pantas membuat tuduhan seperti itu. Apalagi, ujanya, faktanya cita-cita mendirikan negara Islam sudah ditinggalkan.

Semua ini merupakan reaksi politik yang lebih didasarkan pada kepentingan jangka pendek. Seharusnya, pernyataan Menhan dipahami sebagai refleksi kecintaannya pada NKRI dan Islam. Penyusupan bukanlah isapan jempol belaka. Bahkan seorang mantan Panglima TNI mengemukakan kepada peneliti kami, “Dulu, ancaman garis keras terhadap NKRI dan Pancasila ada di luar pemerintahan, seperti DI/NII. Tapi sekarang, garis keras sudah masuk ke dalam pemerintahan, termasuk parlemen, dan menjadi jauh lebih berbahaya dari sebelumnya.”⁵⁴

Saat ini, mantan Ketua PKS menempati posisi strategis sebagai Ketua MPR RI. Tiga tokoh lainnya menjadi menteri dalam kabinet, termasuk departemen pertanian yang sangat strategis karena punya cabang di semua kecamatan seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan menguasai apa pun yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani. Bahkan, menurut seorang pengasuh salah satu pesantren besar di Jawa Tengah, “PKS sudah berhasil menyusup sampai ke desa-desa di berbagai daerah di Jawa Tengah dengan memanfaatkan fasilitas Departemen Pertanian.”⁵⁵

Dewasa ini bangsa Indonesia menyaksikan buah koalisi partai-partai garis keras dengan politisi dan parpol-parpol oportunistis. Secara makro, beberapa tahun ini pemerintah Indonesia mendapat banyak pujian internasional karena adanya kemajuan situasi ekonomi serta “keberhasilan” menangkap dan mengadili para pelaku teror atas nama Islam. Semua ini menciptakan citra adanya stabili-

54. Wawancara peneliti konsultasi pada 17 September 2008

55. Wawancara peneliti konsultasi di Jakarta pada bulan Maret 2008.

tas. Tapi sebenarnya, di luar perhatian pers dan politisi internasional, dan banyak masyarakat Indonesia sendiri, situasi sosial dalam konteks keagamaan di Indonesia menjadi semakin tidak kondusif karena adanya kerjasama antara para politisi dan parpol oportunis dengan parpol dan gerakan garis keras yang telah membiarkan ideologi, agen dan agenda garis keras masuk ke mana-mana hampir di semua bidang kehidupan bangsa Indonesia.

Peneliti kami mendapat penjelasan dari seorang sejarawan yang juga aktif mempelajari dan meneliti pendidikan para imam dan khatib serta pandangan keagamaan yang disampaikannya dalam khotbah Jum'at, "Ketika saya mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan di banyak masjid waktu shalat Jum'at di Jakarta, saya khawatir dengan masa depan negeri ini." Dia menambahkan, "Khotbah Jum'at yang disampaikan banyak berisi kecaman terhadap pihak lain, yang sebenarnya tidak pantas dilakukan di dalam masjid."⁵⁶

Ustadz AR adalah alumni Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, yang memiliki pandangan moderat-progresif. Ia mengagumi Syeikh al-Akbar al-Azhar, Muhammad Sayyid Thantawi karena pandangan-pandangan keagamaannya yang bersifat moderat. Para alumni al-Azhar seangkatannya yang telah kembali ke Indonesia juga banyak yang memiliki pandangan seperti dirinya. Sejak tahun 2002 ustadz AR rutin memberikan pengajian di beberapa perkantoran di Jakarta, baik milik pemerintah atau BUMN maupun swasta. Namun sejak tahun 2004, ustadz AR harus menerima kenyataan pahit bahwa ia "dipecat" sebagai penceramah di perusahaan ekspedisi di Jakarta Selatan dan kantor Beacukai di Jakarta Timur.

Ustadz AR tidak tahu apa kesalahannya. Selidik punya selidik, ternyata Badan Pembinaan Rohani Islam atau Binroh di dua kantor tersebut kini telah dikuasai oleh kelompok Tarbiyah (PKS). Beberapa temannya sesama ustadz pun rupanya mengalami hal yang sama. Sudah menjadi tradisi bagi kelompok Tarbiyah jika sudah

56. Wawancara peneliti konsultasi di Jakarta pada bulan Agustus 2007.

mengendalikan sebuah forum pengajian, maka mereka akan mengambil seluruhnya, termasuk menetapkan materi dan mengatur siapa saja yang boleh dan tidak boleh mengajar di forum tersebut. Sudah pasti mereka akan mengganti para pengajar dengan orang-orang mereka sendiri yang sepaham, dan memanfaatkannya sebagai forum sosialisasi ideologi dan agenda politik mereka.

Cerita lain dikemukakan oleh BM, seorang aktivis Islam yang pernah bergiat di Youth Islamic Study Club (YISC) al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Berbekal idealisme dan jaringan alumni al-Azhar, BM dan teman-temannya sering mengkoordinasi pengajian di kantor-kantor perusahaan besar di Jakarta. Adapun para dosen atau pengajar yang masuk dalam daftar BM dkk. adalah doktor-doktor keislaman alumni Barat dan Timur Tengah yang mengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Universitas Paramadina, atau kalangan cendekiawan Muslim terkemuka lainnya. Dalam 5 tahun, aku BM, ia dan kawan-kawan telah berhasil mengorganisasi belasan forum pengajian di kantor-kantor perusahaan besar di Jakarta. Namun, sejak tahun 2003, BM mengaku proposal yang ia tawarkan untuk melanjutkan kegiatan tersebut selalu ditolak oleh kantor dan perusahaan yang sama. Setelah diselidiki, ternyata lembaga Binroh kantor dan perusahaan itu memang sudah “jatuh” ke tangan kelompok Tarbiyah. Sejak itu, ia dan teman-temannya tahu diri dan mundur teratur.

Bagaimana corak dan warna pengajian yang dibawakan oleh kelompok Tarbiyah ini? Kiranya penuturan seorang sumber bernisial AT berikut ini cukup memberi gambaran. AT adalah direktur sebuah perusahaan telekomunikasi yang berkantor di kawasan Jalan Jend. Sudirman Jakarta. Menurutnya, pengajian anak-anak buahnya di kantornya saat ini berbeda dari pengajian yang dulu biasa dilakukan yang lebih menekankan spiritualitas, intelektualitas, akhlak, dan etos kerja. Pengajian saat ini menurutnya cenderung keras serta berbau politik dan jihad. Tak jarang, ujarannya, penceramah mengangkat topik yang kontroversial di masyarakat dan tidak

ragu-ragu menghujat kelompok lain. “Terus terang, saya cemas dengan perkembangan ini. Tapi karena saya orang yang awam di bidang agama, saya tidak bisa berbuat apa-apa,” untkapnya.

Perihal adanya penyusupan ideologi di forum-forum pengajian kantor pemerintah pernah menggegerkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Bogor, yang dipimpin Walikota Nur Mahmudi Ismail, mantan Presiden PKS. Adalah Hasbullah Rachmad, ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Depok, yang mengungkapkan hal tersebut pada Desember 2006. Hasbullah memberi contoh bahwa pengajian rutin yang dibawakan guru ngaji dari Fraksi PKS di kalangan birokrasi Pemkot Depok merupakan bentuk pemaksaan. “Mereka yang ingin karirnya naik diwajibkan ikut pengajian PKS. Itu benar-benar terjadi,” kata Hasbullah. Langkah yang dilakukan Nur Mahmudi dan Fraksi PKS ini, menurut Hasbullah, sangat meresahkan pegawai Pemkot Depok. Hasbullah mengatakan, seandainya dia wali kota, dia tidak perlu menggelar pengajian semacam itu. “Saya cukup lakukan kontrak politik dengan pejabat dinas. Misalnya bisa *nggak* menerbitkan IMB dalam waktu seminggu? Kalau tak mampu, ya kita ganti. Itu yang penting dilakukan untuk tingkatkan pelayanan masyarakat,” jelasnya.⁵⁷

Sebenarnya jaringan para ustadz PKS yang tersebar di berbagai kantor dan perusahaan bukan sesuatu yang baru. Para alumni gerakan *usroh* atau Tarbiyah Ikhwanul Muslimin yang dulunya merupakan aktivis pengajian di kampus-kampus setelah lulus kuliah mereka bekerja di berbagai perusahaan. Tidak hanya di perkantoran atau perusahaan di Jakarta, tapi juga di perusahaan-perusahaan besar di seluruh Indonesia. Melalui mereka inilah jaringan pengajian *a la* Tarbiyah dibentuk di tempat mereka bekerja sekarang. Jadi, jaringan yang pernah mereka bangun dalam gerakan

57. “Fraksi PKS Diingatkan Tak Paksakan Ideologi Partai,” *Kompas*, 18 Desember 2006.

dakwah di kampus dahulu, mereka lanjutkan ketika bekerja di perusahaan-perusahaan besar tersebut.⁵⁸

Dalam risalah resminya sendiri, PKS memang menyatakan secara eksplisit tentang penyebaran kader mereka melalui tiga tahap, yaitu: *Pertama*, penyebaran kader dakwah ke organisasi/lembaga di berbagai sektor kehidupan menuju pusat kekuatan dan kebijakan; *kedua*, penapakan karir kader dakwah dalam organisasi/lembaga tersebut; *ketiga*, berperan dalam mempengaruhi, merumuskan, menerjemahkan, dan mengimplementasikan kebijakan publik agar sesuai dengan *manhaj* Islam.⁵⁹

Sebagai partai dakwah, tentu saja PKS berhak mengambil peran dalam syiar Islam di masyarakat. Namun ketika dakwah yang dilakukan berhimpitan dengan tujuan-tujuan politik untuk memobilisasi dukungan dalam rangka memenangkan pemilu, maka umat Islam yang bukan PKS pun berhak untuk menolak dan membentengi diri. Menurut Ketua PP. Muhammadiyah, Haedar Nashir:

Ukhuwah dengan sesama kelompok Islam maupun dengan komponen bangsa lainnya, tidak harus mengorbankan kebutuhan Muhammadiyah. Justru sebaliknya, jika benar-benar ingin membangun ukhuwah, maka sesama gerakan Islam jangan saling mengganggu, apalagi menganggap diri alternatif dan kemudian memposisikan seluruh kelompok/jamaah Islam lain wajib dimasuki dan “di-Islam-kan kembali.” Sikap seperti itu selain angkuh dan merusak etika sesama umat Islam, bahkan dapat menyebarkan benih konflik dan permusuhan di tubuh umat Islam. Jika Muhammadiyah melakukan pemagaran diri, bukanlah anti-ukhuwah, juga bukan reaksioner. Lihatlah masalah dari hulu, jangan dari hilir. Tak ada asap, tak

58. Ali Said Damanik, *op., cit.*, h. 161.

59. Lihat, *Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera* (Jakarta: Majelis Pertimbangan Pusat PKS, 2007), h. 20.

ada api. Muhammadiyah sekadar mereaksi dan kemudian melakukan pemagaran diri. Jika ingin ukhuwah justru kembangkan sikap saling toleran, saling memahami, dan saling menghargai, jangan merasa diri paling Islami dan sebagai alternatif dari yang lain.

Bahkan partai Islam apa pun, tetap memiliki misi dan kepentingan sendiri, tidak identik dengan Islam itu sendiri. Partai politik kendati berlabel Islam atau dakwah bahkan sejatinya tetap partai politik, yang orientasi utamanya tetap pada perjuangan kekuasaan untuk dirinya sendiri, karena itu tidak harus dipersepsikan sebagai mewakili Islam dan umat Islam secara keseluruhan.⁶⁰

Penutup

Dalam konteks inilah kita bisa memahami jika umat Islam Indonesia bereaksi keras terhadap penyebaran kader PKS, dan di mata mereka justru merupakan infiltrasi. Itulah alasan mengapa Muhammadiyah mengeluarkan SKPP No. 149 tahun 2006 yang melarang anggotanya memanfaatkan organisasi Muhammadiyah untuk kepentingan politik. Demikian juga NU yang mengeluarkan fatwa-fatwa untuk mewaspadaikan dan melawan ideologi dan gerakan transnasional. Dewasa ini ancaman terhadap Pancasila dan NKRI serta Islam sekaligus semakin kuat dan berbahaya. Karena dengan ideologi, sistem dan kekuatan dana yang dimiliki, para agen garis keras telah berhasil menyusup ke berbagai sektor kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai elemen terbesar bangsa Indonesia, bahkan komunitas Muslim terbesar di dunia, umat Islam Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral yang sangat besar untuk menyelamatkan tidak hanya NKRI dan Pancasila dari berbagai ancaman, melainkan juga berkewajiban menyelamatkan Islam dari pembaja-

60. Haedar Nashir, *Kristalisasi Ideologi & komitmen Bermuhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 8-9.

kan dan pemudaran nilai-nilainya yang luhur dan mulia. Semua ini bisa dilakukan, di antaranya, dengan menyadari keterbatasan pemahaman dan pengetahuan kita, terus belajar secara terbuka dan rendah hati, dan mengamalkan ajaran agama yang penuh spiritualitas dan kasih sayang Tuhan. Jika demikian, kita akan bersikap toleran dan menghargai perbedaan dan kebebasan, serta menolak usaha siapa pun yang hendak menjadikan Islam sebagai media kekuasaan.